



Kementerian Agama Republik Indonesia
Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan



Sistem Deteksi Dini Konflik Sosial *Religiosity Index 2022*

Modul I - X

Edisi
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota



Tim Penyusun

Anton Aliabbas, Ph.D
Marianna Hasbie, M.Li
Dr. Mahmud Syaltout, SH, DEA
Dr. phil. Shiskha Prabawaningtyas
Dr. Tatok Djoko Sudiarto, M.Si
Dr. phil. Syaifuddin Zuhri
Alto Latububun, MIS, PhD
Dr. Alfon Satria Harbi, M.Si
Dr. Muhammad Zulkarnain, M.Si

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
MODUL I.....	1
I. 1. Deskripsi	1
I. 2. Tujuan dan Hasil Belajar	2
I. 3. Topik	3
I. 4. Sumber dan Bahan	3
I. 5. Metode Pembelajaran.....	3
I. 6. Waktu.....	4
I. 7. Langkah Pembelajaran.....	4
I.8. Bahan Bacaan.....	4
I. 8. 1. Asumsi Dasar Konflik.....	4
I. 8. 2. Sumber Konflik	6
I. 8. 3. Ragam konflik	8
I. 8. 4. Siklus Resolusi Konflik.....	9
I.9. Contoh Kasus	11
LEMBAR KERJA PRETEST.....	14
MODUL II	17
II. 1. Deskripsi	17
II. 2. Tujuan.....	18
II. 3. Topik.....	19
II. 4. Sumber dan Bahan.....	19
II. 5. Metode Pembelajaran	19
II. 6. Waktu.....	19
II. 7. Langkah Pembelajaran	20
II. 8. Bahan Bacaan	20
II. 8. 1. Persoalan dalam Dimensi Keagamaan.....	21
II. 8. 2. Persoalan dalam Dimensi Kebangsaan	21
II.9. Contoh Kasus.....	22
MODUL III.....	24
III. 1. Deskripsi.....	24
III. 2. Tujuan dan Hasil Belajar	24
III. 3. Topik	25
III. 4. Sumber dan Bahan	26
III. 5. Metode Pembelajaran.....	26

III. 6. Waktu	26
III. 7. Langkah Pembelajaran	26
III. 8. Bahan Bacaan	26
III. 8. 1. Skema Analisis Konteks Konflik Sosial.....	26
III. 8. 2. Analisis Kualitas Informasi	28
III. 8. 3. Analisis Fakta dan Norma (<i>Island of Agreement</i>)	31
III. 9. Contoh Kasus	34
MODUL IV.....	36
IV. 1. Deskripsi	36
IV. 2. Tujuan	37
IV. 3. Topik	38
IV. 4. Sumber dan Bahan	38
IV. 5. Metode Pembelajaran.....	38
IV. 6. Waktu	38
IV. 7. Langkah Pembelajaran	38
IV. 8. Bahan Bacaan.....	39
IV. 8. 1. Metodologi Pemetaan Risiko	39
IV. 8. 2. Variabel Pemetaan Risiko	40
IV. 9. Contoh Kasus	45
MODUL V	48
V. 1. Deskripsi.....	48
V. 2. Tujuan.....	48
V. 3. Topik	49
V. 4. Sumber dan Bahan.....	50
V. 5. Metode Pembelajaran	50
V. 6. Waktu	50
V. 7. Langkah Pembelajaran	50
V. 8. Bahan Bacaan	51
V. 8. 1. Metodologi Stakeholder Map	51
V. 8. 2. Variabel Stakeholder Map	54
V. 8. 3. Tahapan Analisis Stakeholder	55
V. 8. 4. Analisis Perilaku dan Eksposur Pemangku Kepentingan	58
V. 9. Contoh Kasus	58
MODUL VI.....	61
VI. 1. Deskripsi	61

VI. 2. Tujuan	61
VI. 3. Topik	62
VI. 4. Sumber dan Bahan	62
VI. 5. Metode Pembelajaran.....	63
VI. 6. Waktu	63
VI. 7. Langkah Pembelajaran.....	63
VI. 8. Bahan Bacaan.....	64
MODUL VII	67
VII. 1. Deskripsi	67
VII. 2. Tujuan	67
VII. 3. Topik.....	68
VII. 4. Sumber dan Bahan.....	68
VII. 5. Metode Pembelajaran	69
VII. 6. Waktu.....	69
VII. 7. Langkah Pembelajaran.....	69
VII. 8. Bahan Bacaan	69
VII. 8. 1. Legitimasi pihak Negosiator	70
VII. 8. 2. Tipe Negosiasi.....	71
MODUL VIII	73
VIII. 1. Deskripsi.....	73
VIII. 2. Tujuan.....	74
VIII. 3. Topik	75
VIII. 4. Sumber dan Bahan.....	75
VIII. 5. Metode Pembelajaran	75
VIII. 6. Waktu	76
VIII. 7. Langkah Pembelajaran	76
VIII. 8. Bahan Bacaan	76
VIII. 8. 1. Pola Narasi.....	77
VIII. 8. 2. Konstruksi Narasi	78
VIII. 8. 3. Pola Penyebaran Narasi	80
VIII. 8. 4. Pola Penerimaan Narasi.....	81
VIII. 8. 5. Identifikasi Posisi, Kepentingan dan Nilai	82
MODUL IX.....	84
IX. 1. Deskripsi	84
IX. 2. Tujuan	84

IX. 3. Topik	85
IX. 4. Sumber dan Bahan	86
IX. 5. Metode Pembelajaran.....	86
IX. 6. Waktu	86
IX. 7. Langkah Pembelajaran	86
IX. 8. Bahan Bacaan.....	86
MODUL X.....	89
X. 1. Deskripsi.....	89
X. 2. Tujuan.....	92
X. 3. Topik	93
X. 4. Sumber dan Bahan.....	93
X. 6. Metode Pembelajaran	93
X. 6. Waktu	94
X. 7. Langkah Pembelajaran	94
X. 8. Bahan Bacaan	95
X. 8. 1. Teori Tahapan Konflik dan Early Warning	95
X. 8. 2. Metode Deteksi Dini Potensi Konflik.....	97
X. 8. 3. Analisis Faktor Konflik	99
BAHAN DISKUSI.....	102
DAFTAR PUSTAKA	107

MODUL I PENGANTAR KONFLIK SOSIAL

I. 1. Deskripsi

“Konflik Sosial, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional”

- Pasal 1. 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2012 -

Konflik selalu identik dengan hal yang beraroma sadis, brutal, dan melibatkan baku hantam fisik. Konflik dalam buku Teori Konflik Sosial karya Webster dibaca sebagai “perkelahian, peperangan atau perjuangan”, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Namun kata tersebut mengalami perluasan arti dengan masuknya “ketidaksepakatan yang meruncing atau oposisi atas berbenturannya berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain.” Perluasan tersebut sebenarnya ingin mengatakan bahwa kata konflik, telah meresap aspek psikologis di balik kata konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri.

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai paradigma dan cara pandang dalam melihat konflik. Pertama, cara pandang psikologis. Dalam cara pandang ini konflik seringkali dilihat sebagai “sebuah kondisi ketidaksepahaman yang melibatkan pihak-pihak karena merasa terancam dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.” Menurut cara pandang ini, konflik biasanya dilihat sebagai sebuah benturan atau pertarungan antar aktor dan kelompok atau budaya [dan negara atau bahkan peradaban] yang memiliki perbedaan pandangan, kultur atau praktik sosial yang berbeda. Cara pandang semacam ini biasanya juga disebut dengan model analisis perilaku (*behaviorial*).

Kedua, cara pandang sosiologis. Cara pandang ini pada umumnya melihat bahwa konflik terjadi karena adanya suatu struktur atau relasi kekuasaan yang timpang dan terjadi dalam suatu proses sejarah yang panjang. Struktur dan relasi kekuasaan itu dapat berwujud dalam sistem ekonomi, politik dan budaya.

Pada dasarnya, konflik bukanlah sesuatu yang netral. Setiap konflik mengandung unsur adanya praktik-praktik untuk menghilangkan pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya

mengenai sesuatu yang diperebutkan. Unsur ini yang membedakan antara konflik dengan sengketa. Sengketa terjadi apabila dua orang atau dua kelompok (bisa lebih) bersaing satu sama lain untuk mengakui (hak atas) suatu benda atau kedudukan yang sama. Dalam definisi ini, jelas, bahwa akses konflik cenderung merugikan pihak tertentu.

Pada dasarnya, konflik dapat dicegah. Lantas, bagaimana kita mencegah konflik? Beberapa bab ke depan, pokok bahasan tentang pencegahan konflik akan diurai satu persatu secara rinci.

I. 2. Tujuan dan Hasil Belajar

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam menjalankan sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Pengantar Konflik Sosial ini adalah para Kakankemenag dapat memahami asumsi dasar konflik, mampu melakukan identifikasi sumber konflik, mengenali wujud konflik, menentukan kategori konflik dan level konflik. Selain itu, para Kakankemenag diharapkan dapat memiliki sensitivitas akan siklus konflik yang terjadi di wilayahnya.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 1 Pengantar Konflik sosial sampai dengan Modul 10 ini adalah agar para Kakankemenag:

1. Memahami proses Identifikasi konflik yang dijalankan oleh para penghimpun data dan pengelola data, baik di tingkat daerah, maupun di tingkat pusat sampai data tersebut tersaji dalam bentuk dashboard dan menghasilkan rekomendasi Tindakan.
2. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan

3. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
4. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

I. 3. Topik

Pembelajaran tentang Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan tentang definisi Konflik Sosial, Asumsi Dasar Konflik, Sumber Konflik, Bentuk Ragam Konflik, Kategori Konflik, dan Level Konflik
2. Pemateri mengajak Kakankemenag untuk merefleksikan diri tentang bagaimana rasanya menjadi mayoritas dan minoritas
3. Mengajak Kakankemenag merefleksikan diri atas keterbatasan yang harus dirasakan oleh kelompok minoritas
4. Mengajak Kakankemenag menganalisa studi kasus tentang konflik sosial yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Kakankemenag diminta menarasikan secara sistematis tentang konflik tersebut dan bagaimana konflik itu dapat diselesaikan.

I. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Pretes
5. Lembar Kerja untuk Studi Kasus
6. Lembar Kerja untuk Proses Identifikasi dan Asesmen Kasus konflik

I. 5. Metode Pembelajaran

1. Pretest
2. Pemaparan oleh pemateri
3. Studi kasus
4. Identifikasi kasus konflik oleh peserta

I. 6. Waktu

Materi Modul 1 dari *Training* ini dilaksanakan selama dua JPL (90 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit Pretest
2. 15 menit pemaparan materi Pengantar Konflik Sosial oleh pemateri
3. 30 menit Studi Kasus
4. 30 menit Identifikasi kasus sebuah konflik oleh para Kakankemenag

I. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Definisi Konflik Sosial; Asumsi Dasar Konflik; Sumber Konflik; Bentuk Ragam Konflik; Kategori Konflik dan Level Konflik	Pemaparan materi
2	Pemateri bercerita: pengalaman (pahit) pribadi /orang lain sebagai minoritas yang berada dalam situasi konflik sosial. Hal ini bertujuan guna menginspirasi Kakankemenag untuk menggali pengalaman pribadinya	Curah pendapat
3	Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan tentang bagaimana sebuah konflik terjadi di daerah mereka, atau konflik yang pernah terjadi di Indonesia	Studi kasus
4	Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk mengelaborasi studi kasus konflik di daerah mereka atau konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Elaborasi tersebut disesuaikan dengan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya.	Studi kasus

I.8. Bahan Bacaan

I. 8. 1. Asumsi Dasar Konflik

- a) Konflik selalu hadir dalam kehidupan manusia

Asumsi ini bertolak belakang bahwa manusia diciptakan dalam perbedaan. Perbedaan ini telah dimulai sejak manusia itu mulai ada. Tidak mampu untuk mengatur perbedaan akan

menimbulkan persengketaan antara manusia. Dalam perselisihan, masing-masing pihak menyatakan bahwa pihaknya yang paling benar, paling baik, paling religius, paling hebat. Di antara mereka terjadi saling klaim hak, bahwa kubu mereka yang paling benar, kubu lain adalah salah, jadi harus dihukum atau dihabisi. Perselisihan yang menuju pada kekerasan fisik dan telah menimbulkan korban, itulah yang dinamakan konflik. Dalam konflik, kedua kubu berupaya untuk menghilangkan kubu yang lain, bahkan sampai nyawa, harta benda kubu lain maupun menghilangkan generasi kubu lain jikalau mungkin. Konflik dapat dianalogikan dengan "drama".

Setiap film membutuhkan aktor, panggung dan skenario, begitu juga konflik. Untuk memahami konflik yang analog dengan drama, maka perlu dijabarkan siapa-siapa aktor yang terlibat dalam konflik. Apakah aktor politik atau militer? Siapakah sutradaranya? Siapa penanggung bebas? Siapa figuran? Panggung apa yang digunakan? Panggung merupakan media untuk mengekspresikan peran dari aktor. Panggung biasanya kelompok etnis, agama atau politik. Kemudian skenario apa di balik peran aktor dan panggung yang digunakan? Kemana tujuan yang ingin dicapai? Apakah wujudnya bisa mengembalikan dominasi kelompok? Status quo? ekonomi? Kekuasaan? Skenario ini bisa bersifat struktural maupun kultural.

b) Konflik selalu mempunyai dua sisi: menciptakan potensi risiko dan potensi manfaat

Huruf China untuk kata "krisis" terdiri dari dua huruf yang berarti bahaya dan peluang. Dalam kaitan dengan perubahan, pada dasarnya konflik merupakan salah satu cara bagaimana sebuah keluarga, komunitas, perusahaan, dan masyarakat berubah. Konflik juga dapat mengubah pemahaman masyarakat akan sesama dan mendorong masyarakat untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara baru. Konflik membawa masyarakat pada klarifikasi pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya.

c) Konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian dan budaya

Konflik mengikuti gaya kepribadian seseorang atau kelompoknya. Reaksi psikologis (melamun, melawan, dingin/diam) berperan sangat kuat dalam mempengaruhi proses konflik. Budaya juga ikut membentuk aturan dan ritual yang membawa kelompok masyarakat pada sebuah konflik.

d) Merujuk kepada fenomena konflik antar komunitas, umumnya ada konflik yang melibatkan masyarakat di satu sisi dan negara di sisi lain

Berdasarkan kajian dari beberapa konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Maluku dan Poso, maka dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya fenomena konflik dapat dianalogikan dengan kebakaran pada suatu hutan yang gundul. Dengan api yang kecil, rumput dan pohon yang sudah kering dengan cepat sekali terbakar, meluas, terlebih-lebih apabila ada angin panas yang kencang, maka kebakaran menjadi tidak terperiikan dahsyatnya. Hal ini juga berlaku bagi konflik. Unsur-unsur dasar suatu hutan gundul yang terbakar adalah unsur rumput dan pohon kering, unsur api, serta unsur angin. Unsur-unsur inilah yang akan dianalogikan dengan dasar terjadinya suatu konflik.

I. 8. 2. Sumber Konflik

Berdasarkan pengalaman empirik di berbagai daerah di Indonesia, terdapat lima pokok sumber konflik sosial di Indonesia. Di dalam berbagai literatur, sifat konflik dibedakan menjadi konflik yang bersifat struktural dan konflik yang bersifat komunal/sosial psikologis/horisontal. Sifat konflik mungkin dapat dibedakan, namun sumber konfliknya tetap akan mengarah kepada pola konflik yang akan dijelaskan di bawah ini.

a) Konflik Struktural

Konflik ini terjadi ketika ada ketimpangan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya (tanah, tambang, hutan). Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak yang lain. Di sisi lain, persoalan geografis dan faktor sejarah/waktu seringkali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan pada satu pihak tertentu/pihak dominan/Pemerintah Pusat. Misalnya, kebijakan yang tidak adil, bahkan disertai penggunaan operasi militer dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu kata kunci untuk memahami konflik ini adalah adanya ketimpangan yang diakibatkan oleh penguasa dan pemilik akses terhadap sumber daya.

b) Konflik Kepentingan

Konflik jenis ini disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak berkesuaian. Konflik kepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih, meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban, dan biasanya yang menjadi korban adalah pihak masyarakat umum. Ciri lain dari konflik

kepentingan adalah terjadinya persaingan yang manipulatif atau tidak sehat antar kedua belah pihak. Konflik yang berdasarkan kepentingan ini bisa terjadi karena masalah yang mendasar (ekonomi, politik kekuasaan), masalah tata cara atau masalah psikologis.

c) Konflik Hubungan Psikologis

Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ada interaksi sosial antar pribadi, antara kelompok, dan antar bangsa. Namun dalam berinteraksi, ada kecenderungan untuk mengambil jalan pintas dalam mempersepsikan seseorang. Bias persepsi ini disebut stereotip yang merupakan cikal bakal dari munculnya prasangka, berlanjut pada perlakuan diskriminasi yang berakhir pada terjadinya tindakan kekerasan. Prasangka adalah sifat yang negatif terhadap kelompok atau individu tertentu semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka muncul karena adanya bias persepsi (*stereotype*), yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan mengambil sikap sebelum menilai dengan cermat. Akibatnya, ada penyimpangan pandangan dari kenyataan yang sesungguhnya serta ada pula generalisasi. Kecenderungan generalisasi (memukul rata) tersebut akan memberi dampak negatif jika sasarannya adalah kelompok minoritas dalam arti, minoritas secara jumlah maupun status. Prasangka kemudian dikonkritkan dalam perilaku dan/atau tindakan diskriminasi.

d) Konflik Nilai

Konflik jenis ini disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak berkesuaian, entah itu dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang setiap individu untuk memberi arti pada kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak. Perbedaan nilai tidak harus menyebabkan konflik. manusia dapat hidup berdampingan dengan harmonis dengan sedikit perbedaan sistem nilai. Konflik nilai muncul ketika orang berusaha untuk memaksakan suatu sistem nilai kepada yang lain, atau mengklaim suatu sistem nilai yang eksklusif yang tidak memungkinkan adanya perbedaan kepercayaan.

e) Konflik Data

Konflik ini terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat, atau mendapat informasi yang salah, tidak sepadat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda. Beberapa Konflik Data mungkin tidak perlu terjadi karena hal

itu disebabkan kurangnya komunikasi diantara orang-orang yang berkonflik. Konflik Data lainnya bisa jadi karena memang disebabkan informasi dan/atau tata cara yang dipakai oleh orang-orang untuk mengumpulkan datanya tidak sama. Selain perlu mengetahui sumber Konflik, para pengambil kebijakan juga perlu memahami tentang ragam konflik.

I. 8. 3. Ragam konflik

Ragam Konflik dapat meliputi wujud konflik, kategori konflik, dan level konflik.

a) Wujud Konflik

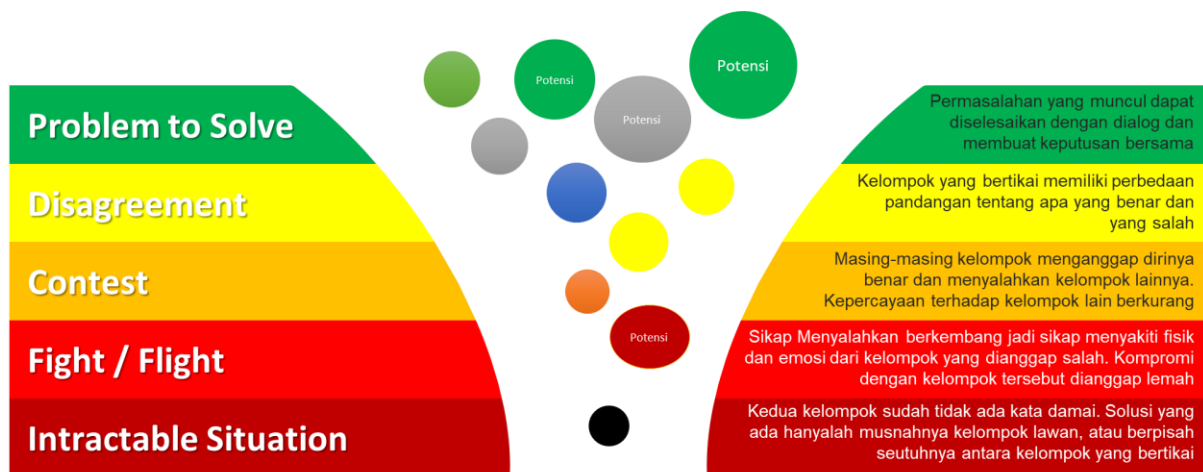
Konflik dapat berwujud tertutup (*latent*), mencuat (*emerging*) dan terbuka (*manifest*). Konflik tertutup dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, dan belum terangkat ke puncak konflik. Sering kali satu atau dua pihak boleh jadi belum menyadari adanya konflik bahkan yang paling potensial sekalipun. Konflik mencuat adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum berkembang. Di sisi lain, konflik terbuka adalah konflik dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah mulai untuk negosiasi, dan mungkin juga mencapai jalan buntu.

b) Kategori konflik

Dalam perkembangan studi perdamaian, ada beberapa kategori konflik. Kategori berdasarkan isu dikenal adanya konflik sumber daya alam, konflik agama, konflik etnis, konflik perburuhan, dan masih banyak lagi. Kategori konflik berdasarkan pihak yang berkonflik, biasanya dikategorikan sebagai konflik horisontal dan konflik vertikal. Konflik horisontal meliputi, konflik antar komunitas, konflik antar kelompok etnis/agama, konflik antar kelompok politik. Sedangkan konflik vertikal dikenal adanya konflik separatisme, konflik antara aparat dengan masyarakat..

c) Level konflik

Pada level manakah konflik dapat muncul? Jawabannya: hampir di semua level, konflik dapat muncul.



Gambar 1.1 Level Konflik

Baik mulai dari level yang terkecil, yaitu di dalam individu dan interpersonal, maupun hingga ke level yang lebih luas seperti komunitas, masyarakat, nasional, internasional dan global. Dalam semua level tersebut akan dijumpai berbagai jenis konflik. Terdapat beberapa kategori konflik sering dipakai. Konflik sering dikategorikan secara sektoral, misalnya konflik di sektor ekonomi, lingkungan, sosial-kultural, politik atau keamanan. Sedangkan level konflik secara teori terdiri dari lima tingkatan. Berdasarkan teori dari *Speed Leas*, level konflik berawal dari level (1) *Problem to Solve*; (2) *Disagreement*; (3) *Contest*; (4) *Fight/Flight*; (5) *Intractable Situation*. Penjelasan lebih rinci akan dijabarkan pada bab berikutnya.

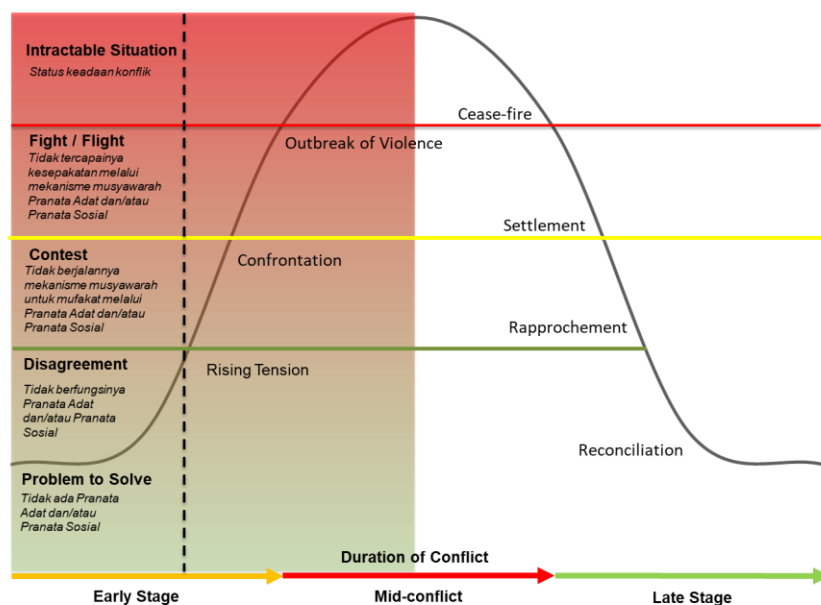
I. 8. 4. Siklus Resolusi Konflik

Dalam perkembangan studi perdamaian, konflik juga memiliki daur hidup. Daur hidup ini sering kali disebut sebagai siklus. Sedangkan resolusi konflik menyangkut upaya penyelesaian konflik dan pencegahannya. Jadi, siklus resolusi konflik merupakan sebuah tahapan ditujukan guna menyelesaikan konflik. Siklus resolusi konflik akan mengikuti daur hidup konflik. Mengapa harus mengetahui siklus resolusi konflik? Tujuan memahami siklus resolusi konflik adalah untuk mengetahui sampai tahapan mana konflik tersebut dan mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Siklus resolusi konflik ini bermula dari konflik, upaya penghentian kekerasan (*peace-keeping*), upaya negosiasi dan

perjanjian damai (*peace-making*), upaya pembangunan perdamaian (*peace-building*), dan upaya pencegahan konflik (*conflict-prevention*).

Ketika konflik tengah terjadi, maka upaya awal yang harus dilakukan adalah menghentikan kekerasan yang ada. Upaya ini yang disebut sebagai upaya penghentian kekerasan (*peace-keeping*). Pada fase ini, semua sistem sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain tidak berjalan normal. Pada kondisi ini biasanya langkah yang ditempuh adalah menerjunkan aparat keamanan, pengerahan pasukan keamanan, dan lain-lain. Tujuan dari penghentian kekerasan adalah untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi dan mencoba untuk melakukan upaya-upaya perdamaian. Setelah kekerasan dapat ditekan, maka tahap selanjutnya adalah upaya perjanjian damai (*peace-making*). Pada fase ini, upaya perdamaian dilakukan dengan melakukan negosiasi, mediasi untuk mencapai kata sepakat tentang keinginan berdamai. Untuk itu, hasil dari tahapan ini adalah berupa kesepakatan-kesepakatan antar pihak yang berkonflik.

Tahap selanjutnya adalah upaya pembangunan perdamaian (*peace-building*). Pada tahap ini, biasanya sistem sosial, hukum, politik, keamanan perlahan pulih kembali. Dimulainya proses penegakan hukum bagi para pelaku konflik, upaya pengungkapan kebenaran, berfungsinya lembaga pemerintah, birokrasi, penanganan terhadap korban konflik, pengungsi dan reintegrasi kelompok yang berkonflik, dan lain-lain. Tahap terakhir ini disebut sebagai tahap pencegahan konflik (*conflict prevention*). Pada fase ini, segala upaya yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan konflik, seperti penguatan kelompok-kelompok rentan, melakukan deteksi konflik, melakukan warning dan respon, mengusulkan payung hukum terhadap konflik dan lain-lain, yang ditujukan untuk mencegah berulangnya konflik (*conflict relapse*).



Gambar 1.2 Siklus Resolusi Konflik

Sumber: Diadaptasi dari Speed Leas, Michael Lund dan UU No.7 Tahun 2012

I.9. Contoh Kasus

Kasus	: Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah dalam satu agama
Lokasi	: Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar, Bali
Waktu kejadian	: April 2021
Pihak yang bertikai	: Warga Desa Adat Kesiman VS Kelompok agama Ashram Krishna Balaram
Sumber Konflik	: Konflik Nilai
Wujud konflik	: Konflik terbuka
Kategori konflik	: Konflik interumat beragama (Hindu)
Level konflik	: <i>Contest</i>
Siklus Resolusi Konflik	: <i>Confrontation</i>
Kronologi kasus	:

Desa Adat Kesiman dengan tegas menutup segala aktivitas ritual yang dilakukan di dalam Ashram Krishna yang terletak di Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar, Bali. Penutupan dilakukan oleh Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, ST., MM., didampingi Prajuru Adat dan Pacalang Desa Adat. Hadir pula berbagai komponen dari Forum Komunikasi Taksu Bali dan pihak berwajib.

Dalam kesempatan itu, Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, menegaskan bahwa ritual yang dilaksanakan di Ashram tersebut telah bertentangan dengan dresta adat Bali dan sudah jelas menggunakan cara-cara Sampradaya di dalam Ashram ini. Berdalih untuk tempat belajar Weda, ternyata di dalam Ashram mengembangkan ajaran Sampradaya non dresta Bali yang sangat menyimpang dengan ajaran Hindu Bali.

Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna mengungkapkan, pihaknya mulai terusik ketika ada utusan datang dari Ashram Krisna Balaram untuk meminta permakluman dan izin menggunakan Setra Adat Kesiman untuk melaksanakan upacara pembakaran jenazah untuk bakta dari Ashram mereka.

Oleh Desa Adat, permohonan itu ditolak. Hal itu, memantik keinginan dari Desa Adat dan Prajuru untuk melihat lebih mendalam aktivitas di dalam Ashram yang selama bertahun-tahun ada di wilayah Desa Adat Kesiman. Dan, ternyata benar, telah terjadi banyak penyelewengan kegiatan ritual dresta adat Bali di Ashram tersebut.

“Berpedoman dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Surat Keputusan Bersama PHDI – MDA Provinsi Bali, kami turun sidak dan menutup segala aktivitas ritual di Ashram tersebut. Kami sudah serahkan surat penutupannya dan Pacalang beserta masyarakat kami akan mengawasi aktivitasnya. Jika masih membandel, kami akan kenakan sanksi adat,” tegas Jro Bendesa Ketut Wisna.

Sementara Sekretaris Umum Forkom Taksu Bali, Khismayana Widjanegara mengatakan, pihaknya akan mendukung dan selalu ada bersama Desa Adat di seluruh Bali mengawal keberadaan dresta adat dan Hindu Bali.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) – MDA (Majelis Desa Adat) yang telah melarang kegiatan Sampradaya di wawidangan Desa Adat, merupakan upaya penegakan dresta Hindu Bali, budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur Bali.

“Kami yang terdiri 40 elemen ormas, peguyuban, yayasan dan sanggar seni budaya Bali, tidak ada kompromi untuk perusak dresta, adat dan budaya yang bernafaskan Hindu Bali,” tegas Khismayana.

Koordinator Tim Hukum Bali Metangi, I Komang Sutrisna, SH., menegaskan, gerak langkah Desa Adat untuk melakukan sidak, turun ke lokasi Ashram dan melakukan penutupan atas aktivitas ritual yang melenceng dari Dresta Adat memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Desa adat, tambah Sutrisna, dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menetapkan aturan-aturan sendiri berupa awig-awig berupa hukum adat. Penyusunan awig-awig desa bersumber dari falsafah Tri Hita Karana, yaitu mengatur keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam.

Dikatakan Sutrisna, Desa Adat memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, terdapat dalam bagian kesatu, Pasal 21, yang mengatakan Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala.

Sementara SKB PHDI-MDA Bali, lanjut Sutrisna, menegaskan, Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan salah satunya, melarang Sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan pura dan wawidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya. Sekain itu, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan Sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembangan ajarannya.

“Ashram ini sudah diawasi, dipantau dan akhirnya diketahui pengembangan ajaran Sampradaya non dresta Bali, sehingga dapat dilakukan pelarangan dengan melakukan penutupan aktivitasnya,” tegas Sutrisna.

Jro Bendesa yang akrab dipanggil JMW ini, juga menambahkan setelah pihaknya mengecek keberadaan penduduk yang ada di dalam Ashram, didapat bukti dan fakta, kebanyakan adalah penduduk di luar Denpasar yang ada dan tinggal di sana. Walau ada yang sudah bertempat tinggal secara Dinas, namun tidak terdaftar sebagai krama adat.

“Kami sempat bertanya, ini tempat ibadah atau apa?. Dijawab tempat belajar. Tapi kami saksikan sendiri, Ashram ini tempat pemujaan dengan cara-cara Sampradaya non dresta Bali. Dengan berpedoman SKB PHDI – MDA dan kewenangan sesuai Perda Desa Adat, segala kegiatan yang berkamuplase ini, harus dihentikan dan ditutup,” tandasnya.

LEMBAR KERJA PRETEST

A. IDENTITAS

1. Nama lengkap:
2. Berapa umur bapak / ibu?
3. Jenis kelamin:
4. Agama yang bapak / ibu anut?
5. Apa jabatan bapak / ibu dalam lingkungan Kementerian Agama?
6. Di provinsi mana bapak/ibu bertugas?
7. Sebutkan nama institusi tempat bapak / ibu bertugas:
8. Nomor Telpon / Whatsapp?
9. Email:

B. MATERI UJIAN PRETEST

1. Bagaimana ibu bapak memahami konflik sosial? Pilih yang sesuai dibawah ini kecuali:
 - a. Benturan fisik
 - b. Kekerasan dua kelompok atau lebih
 - c. Meningkatnya negosiasi antar kelompok
 - d. Berdampak luas
 - e. Mengakibatkan disintegrasi sosial
2. Apakah yang dimaksud dengan siklus penyelesaian konflik dan pencegahan yang bermula dari konflik kecuali:
 - a. Penghentian kekerasan
 - b. Upaya negosiasi
 - c. Upaya pembangunan perdamaian
 - d. Upaya berdamai dengan negosiator
 - e. Upaya pencegahan konflik
3. Konflik sosial dalam dimensi keagamaan menurut Ibu Bapak antara lain meliputi
 - a. Konflik geng motor

- b. Konflik antar perguruan silat
 - c. Penolakan rumah ibadah
 - d. Konflik antar propinsi
 - e. Perseteruan supporter sepakbola
4. Apabila terjadi konflik sosial berdimensi kebangsaan maka Bapak Ibu akan menghadapi persoalan seperti:
- a. Politik identitas
 - b. Ketidaksetujuan terhadap ketua PSSI
 - c. Keengganan menerima aliran agama
 - d. Ekonomi rakyat
 - e. Kebutuhan mempelajari agama lain
5. Informasi menempati posisi penting dalam pendeteksian konflik sosial, kualitas informasi bergantung pada beberapa faktor antara lain kecuali:
- a. Kejelasan informasi
 - b. Kualitas teknologi informasi
 - c. Kualitas teknologi informasi
 - d. Verifikasi pihak ketiga
 - e. Kualitas pengetahuan informan
6. Pada penanganan konflik sosial diperlukan ruang kesepakatan agar mempertemukan orang, permasalahan dan alternatif solusi yang didasarkan pada:
- a. Fakta yang dipakati
 - b. Nilai yang didasarkan pada hasil penilaian kelompok
 - c. Paham kelompok yang memegang otoritas
 - d. Regulasi pemerintah
 - e. Saran ahli strategi
7. Pada proses analisa risiko, tahap pemetaan risiko sebuah konflik dapat menghasilkan:
- a. Laporan dan analisa risiko
 - b. Pemahaman yang komprehensif
 - c. Laporan level kerawanan yang presisi
 - d. pembicaraan damai antar kelompok yang berkonflik

- e. Kesepahaman ketua kelompok
8. Pemetaan stakeholder yang presisi merupakan serangkaian analisa yang dimulai dari tahapan dibawah ini kecuali:
 - a. Identifikasi semua stakeholder
 - b. Identifikasi kebutuhan stakeholder
 - c. Klarifikasi pemahaman stakeholder
 - d. Identifikasi konflik
 - e. Penyelarasan kebutuhan stakeholder
 9. Analisa jejaring yang dipunyai stakeholder pada konflik sosial yang terjadi di wilayah tertentu menghasilkan:
 - a. Laporan dan kebutuhan dana
 - b. Foto dan dokumentasi lainnya
 - c. Laporan identifikasi pelaku
 - d. Pola struktural dan tren interaksi
 - e. Tren informasi
 10. Proses negosiasi dalam konflik sosial diperlukan dapat dipergunakan dalam proses:
 - a. Pencegahan paham radikal
 - b. Melarang pihak lain untuk bergabung
 - c. Meredam hoax
 - d. Meredam eskalasi konflik
 - e. Mengidentifikasi informasi yang diperlukan
 11. Menciptakan ruang kesepakatan antar kelompok dan mediator dalam konflik sosial merupakan bagian dari Tindakan:
 - a. Tindakan pencegahan kekerasan dan eskalasi konflik
 - b. Menghasilkan diskusi antar kelompok
 - c. Menciptakan komunikasi yang efektif
 - d. Menghasilkan laporan yang presisi
 - e. Pengarahan pemimpin yang efektif

MODUL II

KONFLIK SOSIAL DALAM DIMENSI KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN

II. 1. Deskripsi

“ Konflik dapat bersumber dari: Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; (...)”

- Pasal 5 Undang-Undang No.7 Tahun 2012 -

Berdasarkan UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Kementerian Agama ikut bertanggung jawab dalam penanganan konflik: pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca-konflik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan peran tokoh agama, yang merupakan salah satu mitra utama dan dibina oleh Kementerian Agama, sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci (*Key Stakeholder*) dalam penanganan konflik sosial di tingkat Nasional, Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No.2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.7 Tahun 2012, Kementerian Agama di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran penting dalam melakukan penguatan kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan penanaman nilai integrasi kebangsaan sebagai sarana penanganan konflik sosial.

Agama, seyogianya mendorong pemeluknya untuk mewujudkan perdamaian dan membangun peradaban untuk kemajuan bangsa. Namun, sejarah bangsa ini mencatat, ada sejumlah konflik sosial yang dilatari oleh isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Berbagai peristiwa konflik tersebut terus terjadi di negara multi etnis dan agama ini. Isu-isu keagamaan kerap menjadi akar utama terjadinya konflik sosial. Konflik sosial berbasis sektarian dan kebangsaan juga marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Berbagai macam konflik sosial berdimensi keagamaan dan kebangsaan ini tentu saja berdampak besar pada integrasi sosial dan juga menyebabkan kerugian besar, baik kehilangan nyawa (korban jiwa) maupun kerugian material. Karena itulah dibutuhkan upaya-upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk mencegah terjadinya konflik sosial dengan membangun dan menjalankan sistem peringatan dini konflik sosial berdimensi keagamaan. Dalam rangka pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan di Indonesia, Kementerian Agama menetapkan Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.

II. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam menjalankan sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) mempelajari tentang materi Konflik Sosial dalam Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan adalah para Kakankemenag dapat memilah mengidentifikasi dan memiliki pemahaman tentang kerusuhan / pertikaian / pertikaian antar kelompok masyarakat di wilayahnya yang dinilai sebagai kriminalitas biasa, atau berpotensi dapat bergeser menjadi konflik keagamaan atau konflik kebangsaan.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 2 Konflik Sosial dalam Dimensi Keagamaan dan Kebangsaan adalah agar para Kakankemenag:

5. Menguasai proses pemilahan antara kasus kerusuhan biasa / kriminalitas biasa dengan kerusuhan yang berlatar belakang keagamaan atau kebangsaan, dan/atau kerusuhan yang dapat digiring menuju konflik keagamaan dan kebangsaan
6. Meningkatkan penguasaan para Kakankemenag tentang bagaimana siklus konflik dalam Dimensi Keagamaan dan Kebangsaan
7. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
8. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
9. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

II. 3. Topik

Pembelajaran tentang Konflik Sosial dalam Dimensi Keagamaan dan Kebangsaan dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang konflik apa saja yang termasuk dalam kategori konflik dalam Dimensi Keagamaan dan Kebangsaan
2. Pemateri mengajak para Kakankemenag untuk merefleksikan diri tentang bagaimana rasanya menjadi mayoritas dan minoritas, terkait dengan konflik-konflik yang termasuk dalam kedua kategori Dimensi tersebut
3. Mengajak para Kakankemenag menganalisa studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menarasikan secara sistematis tentang konflik tersebut dan bagaimana konflik itu dapat diselesaikan.

II. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/block note (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus
5. Lembar Kerja untuk Proses Identifikasi dan Asesmen Kasus konflik

II. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus
3. Identifikasi kasus konflik oleh para Kakankemenag
4. *Small Group Discussion*
5. Curah pendapat

II. 6. Waktu

Materi Modul 2 dari Training ini dilaksanakan selama tiga JPL (135 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit *ice breaking*

2. 30 menit pemaparan materi Konflik Sosial dalam Dimensi Keagamaan dan Kebangsaan oleh pemateri
3. 30 menit Studi Kasus
4. 30 menit Identifikasi kasus sebuah konflik oleh para Kakankemenag
5. 30 menit Small Group Discussion dan curah pendapat

II. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang konflik apa saja yang masuk dalam kategori konflik dalam Dimensi Keagamaan dan Kebangsaan	Pemaparan materi
2	Pemateri bercerita: pengalaman (pahit) pribadi /orang lain sebagai minoritas yang berada dalam situasi konflik sosial. Hal ini bertujuan guna menginspirasi para Kakankemenag untuk menggali pengalamannya	Curah pendapat
3	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan satu contoh konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan yang pernah terjadi di daerah mereka, atau yang pernah terjadi di Indonesia	<i>Small Group Discussion</i>
4	Para Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk mengelaborasi studi kasus konflik tersebut. Elaborasi tersebut dijelaskan Sumber Konflik; Bentuk Konfliknya; Kategori konflik; dan Level konfliknya	Studi kasus
5	Para Kakankemenag dari kelompok lainnya akan memberi respon, apresiasi, dan refleksi dari hasil Pemaparan Studi kasus dari kelompok lainnya	<i>Small Group Discussion</i>

II. 8. Bahan Bacaan

Berdasarkan amanat UU No.7 Tahun 2012 dan PP No.2 Tahun 2015, serta empat indikator Moderasi Beragama, maka fokus utama Kementerian Agama dalam Penanganan konflik sosial mencakup Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan.

II. 8. 1. Persoalan dalam Dimensi Keagamaan

Persoalan Konflik Sosial dalam Dimensi Keagamaan dapat dijabarkan dalam lima kategori sebagai berikut:

1. Konflik sosial antarumat beragama
2. Konflik sosial interumat beragama
3. Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah agama lain
4. Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah dalam satu agama
5. Persoalan keagamaan lainnya

Persoalan agama lainnya dapat berupa permasalahan antara lain: Penistaan agama; ujaran kebencian terhadap aliran atau agama tertentu; aktivitas politik, sosial, ekonomi dan budaya yang menggunakan sentimen keagamaan seperti tidak mau berbelanja ke toko yang pemiliknya berbeda agama; membuat dan menyebarkan informasi yang salah terhadap aliran dan/atau agama tertentu

II. 8. 2. Persoalan dalam Dimensi Kebangsaan

Persoalan konflik sosial dalam Dimensi Kebangsaan berfokus kepada persoalan yang dinilai dapat merusak konsep negara yang telah disepakati para pendiri bangsa Indonesia. Persoalan tersebut apabila terus dibiarkan dan tidak dimitigasi dinilai akan dapat merusak kedaulatan negara Indonesia. Kelima persoalan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme. Radikalisme adalah sikap dasar yang menghendaki perubahan menyeluruh terhadap sistem dan tatanan kenegaraan, sekaligus membahayakan ideologi negara dan keamanan negara (UU No.5 Tahun 2018). Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan / atau Tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme (Perpres No.7 Tahun 2021). Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (UU No.5 Tahun 2018);

2. Separatisme; Separatisme merupakan paham atau gerakan memisahkan diri (mendirikan negara sendiri) dan mengancam kedaulatan NKRI (UU No.16 Tahun 2017);
3. Anti pemerintah; Anti pemerintah merujuk pada sikap melawan, menentang dan / atau memusuhi pemerintah yang dapat mengancam kedaulatan negara;
4. Politik identitas; Politik Identitas merupakan politik yang digunakan dengan penegasan pembedaan antara kelompok satu dengan kelompok lain berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA);
5. Persoalan kebangsaan lainnya.

II.9. Contoh Kasus

Dimensi Kasus	: Dimensi Keagamaan
Kasus	: Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah dalam satu agama
Lokasi	: Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh
Waktu Kejadian	: Oktober 2022
Pihak yang bertikai	: Muhammadiyah VS sekelompok warga desa
Sumber Konflik	: Konflik Nilai
Wujud konflik	: Konflik terbuka
Kategori konflik	: Konflik interumat beragama (Islam)
Level konflik	: <i>Contest</i>
Siklus Resolusi Konflik	: <i>Disagreement</i>
Kronologi kasus	:

Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dikabarkan dihalang-halangi oleh sekelompok orang.

Menanggapi hal tersebut Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan prihatin. "Kami mengelus dada, prihatin, kenapa kejadian seperti ini terjadi di Aceh yang merupakan daerah dengan otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam, bukankah pembangunan masjid adalah wujud nyata pelaksanaan syariat Islam itu sendiri," kata Ketua LBH PP Muhammadiyah Taufiq Nugroho dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2022.

Menurut dia, pendirian Masjid Taqwa telah sesuai dengan Qanun atau Peraturan Daerah Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Ketentuan tersebut telah menghapus syarat-syarat berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pendirian Rumah Ibadah, khusus untuk pendirian masjid di Nangroe Aceh Darussalam. Berikutnya, Masjid Taqwa Muhammadiyah juga telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"(Pendirian Masjid Taqwa) juga sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait dengan jumlah pengguna masjid dan pendukung pendirian masjid," tambah Taufiq.

Oleh karena itu, LBH PP Muhammadiyah merasa prihatin atas terjadinya peristiwa kemunculan sekelompok orang yang tidak diketahui asal-usul organisasi, namun mengatasnamakan golongan mayoritas untuk menghalang-halangi, bahkan menghancurkan Masjid Taqwa Muhammadiyah yang sedang dalam pembangunan itu.

Padahal, warga Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, termasuk di Desa Sangso, bukan merupakan pendatang baru melainkan mereka telah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1930-an.

Taufiq mengatakan, pendirian masjid telah dijamin dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Berdasarkan pendapat warga, Faktor penyebab penolakan pembangunan masjid Taqwa Muhammadiyah: pertama, menimbulkan perpecahan karena dikatakan masjid kelompok; kedua, melanggar wilayah kemasjidan dekat dengan masjid jami'/masjid raya Samalanga.

.

MODUL III

ANALISIS KONTEKS KONFLIK SOSIAL

III. 1. Deskripsi

Menganalisis kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi konflik merupakan bagian utama dari pekerjaan para profesional kemanusiaan di lapangan. Tugas ini sangat penting dalam memetakan kondisi masyarakat di garis depan untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang aspek sosial, budaya, dan kondisi politik dari situasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang bertikai. Analisis ini merupakan persiapan lebih lanjut untuk melakukan refleksi dengan tim negosiasi mengenai posisi, kepentingan, dan motif dari pihak yang bertikai.

Tugas-tugas ini merupakan inti dari tahap *Early Warning System (EWS)* atau Sistem Deteksi Dini yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Tahapan ini juga akan memberikan waktu bagi tim negosiasi untuk berbagi data dengan otoritas lain dan membandingkan data temuan dari dalam dan luar tim investigasi agar bisa mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kondisi konflik. Pada tahap ini, para Kakankemenag sebagai peserta pelatihan akan fokus kepada praktik untuk memilah informasi tentang konteks konflik guna mengembangkan rencana taktis untuk memitigasi konflik agar tidak semakin memburuk.

III. 2. Tujuan dan Hasil Belajar

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus mengenal sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Konteks Konflik Sosial adalah para Kakankemenag dapat mengenali proses yang

akan dilakukan dalam memilah informasi yang berkualitas tentang konflik, mengenali proses yang akan dilakukan dalam menganalisis Fakta dan Norma yang berlaku diantara kelompok masyarakat yang bertikai. Pengenalan tersebut sangat diperlukan oleh para Kakankemenag agar apabila hasil analisis telah disusun, para Kakankemenag dapat segera paham dalam membangun strategi mitigasi berdasarkan analisis tersebut

10. Mengenalkan para Kakankemenag tentang proses penghimpunan data dan informasi, proses mengolah data sampai dengan penyajian data dan rekomendasi Tindakan.
1. Mengenalkan para Kakankemenag tentang bagaimana sistem dalam membangun Ruang Kesepakatan (*Island of Agreement*) antara kedua kelompok masyarakat yang sedang berkonflik
2. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
3. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
4. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

III. 3. Topik

Pembelajaran tentang Konteks Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana memahami sebuah konflik dapat terjadi, dan bagaimana manajemen konflik agar sebuah konflik dapat dihindari, atau walaupun telah terjadi, bagaimana cara agar eskalasi konflik tersebut tidak semakin memburuk.
2. Mengajak para Kakankemenag menganalisis studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menarasikan secara sistematis tentang konflik tersebut dan bagaimana konflik itu dapat diselesaikan.

III. 4. Sumber dan Bahan

–

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus

III. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus

III. 6. Waktu

Materi Modul 3 dari Training ini dilaksanakan selama satu JPL (45 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit pemaparan materi Analisis Konteks Konflik Sosial oleh pemateri
2. 30 menit Studi Kasus

III. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Konteks Konflik, bagaimana menyaring informasi yang valid tentang konflik, dan mekanisme dalam membangun Ruang Kesepakatan (Island of Agreement) antara kedua belah pihak yang berkonflik	Pemaparan materi
2	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan membedah satu contoh konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan yang telah mereka pilih dalam pelatihan sebelumnya. Pembedahan tersebut akan menggunakan pendekatan Network Map.	Studi kasus

III. 8. Bahan Bacaan

III. 8. 1. Skema Analisis Konteks Konflik Sosial

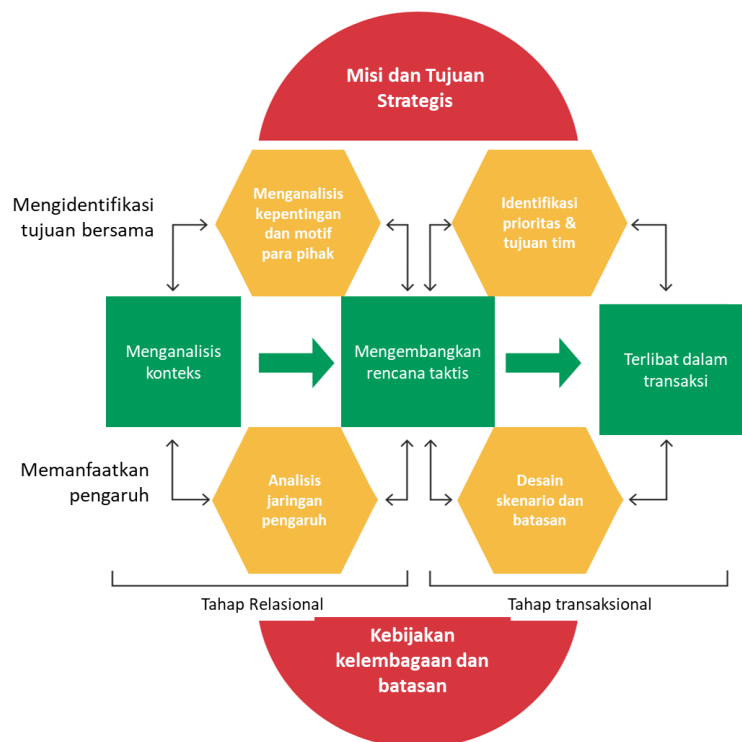
Menganalisis kondisi lingkungan yang berpotensi menjadi konflik merupakan bagian utama dari pekerjaan para profesional kemanusiaan di lapangan. Tugas ini sangat penting dalam

memetakan kondisi masyarakat di garis depan untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang aspek sosial, budaya, dan kondisi politik dari situasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan pihak-pihak yang bertikai. Analisis ini merupakan persiapan lebih lanjut untuk melakukan refleksi dengan tim negosiasi mengenai posisi, kepentingan, dan motif dari pihak yang bertikai.

Tugas-tugas ini merupakan inti dari tahap EWS yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan mitra dan pemangku kepentingan lainnya. Tahapan ini juga akan memberikan waktu bagi tim negosiasi untuk berbagi data dengan otoritas lain seperti kepolisian dan membandingkan data temuan dari dalam dan luar tim investigasi agar bisa mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kondisi konflik.

Pada tahap ini, para Kakankemenag pelatihan akan fokus kepada praktek untuk memilah informasi tentang konteks konflik guna mengembangkan rencana taktis untuk memitigasi konflik agar tidak semakin memburuk.

Berikut di bawah ini skema analisis konteks konflik sebagai sumber informasi untuk membangun *Network Map* dan analisis motif dari pihak yang bertikai



Gambar 3.1 Skema Analisis Konteks Konflik

III. 8. 2. Analisis Kualitas Informasi

Setiap konflik pasti memiliki dua narasi yang saling berseberangan dan saling bertentangan tentang situasi yang tengah terjadi. Di kubu pertama, mereka merasa menjadi pihak yang dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok kedua. Sedangkan kelompok kedua memiliki narasi bahwa mereka berhak melakukan hal tersebut karena mereka telah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib.

Keakuratan dan kualitas informasi wajib dimiliki oleh pihak investigasi agar dapat menentukan sikap dalam menghadapi kedua kubu yang sedang bertikai. Tujuan utama dari tim investigasi adalah menemukan cara agar menemukan titik temu dari kedua kubu yang memiliki narasi berbeda tersebut agar bisa diperoleh solusi atau jalan tengah sehingga konflik dapat diatasi.

Pelacakan informasi yang benar jauh lebih penting dibandingkan tingkat urgensi dari konflik tersebut. Pada umumnya, semakin panas kondisi konflik, maka informasi yang diperoleh dari kubu yang bertikai akan semakin bias oleh emosi dan subjektivitas sehingga kredibilitas dari informasi tersebut semakin buruk.

Bahkan dalam keadaan darurat, tim investigasi akan semakin sulit mendapatkan informasi yang berkualitas karena terbatasnya akses ke kubu yang bertikai. Namun jangan merendahkan kemampuan dari informasi yang solid, tidak ambigu dan bisa diverifikasi tersebut, karena apabila tim mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang keliru, solusi yang dihasilkan justru dapat memperburuk situasi.

Kualitas informasi akan bergantung pada beberapa faktor:

1. Kualitas pengetahuan dari informan yang terpercaya (Contoh: jumlah korban diperoleh dari RS setempat)
2. *Chain of Custody (CoC)*: yaitu kronologis dan dokumentasi
3. Kejelasan informasi; tidak ambigu, dan jelas
4. Informasi yang diperoleh telah diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen.

Pada umumnya, informasi yang buruk berasal dari sumber yang tidak kredibel, integritas informan yang terpengaruh oleh subjektivitas, kronologi informasi yang tidak jelas dan tidak diverifikasi oleh pihak lain yang netral.

Ada beberapa hambatan yang dialami tim investigasi dalam memperoleh informasi yang berkualitas, yaitu hambatan keamanan, kecurigaan dari kubu yang bertikai, kendala bahasa, perbedaan budaya dan lain sebagainya. Akhirnya para tim investigasi sering kali hanya mengandalkan informasi dari satu sumber. Akibatnya tim sering menghasilkan saran tindak dengan mengandalkan informasi yang tidak jelas dan ambigu.

Berikut di bawah ini beberapa sumber informasi yang kredibel untuk dijadikan bahan analisis,

ELEMEN INFORMASI	SUMBER INFORMASI
Aspek politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum dari konflik yang berlangsung, dan penyebab serta bagaimana konflik tersebut berkembang	Media, pernyataan akademisi / sejarawan / ahli hukum / aktivis / tokoh politik / aparat keamanan dan lain-lain
Permasalahan kemanusiaan yang muncul dari konflik tersebut	Data pemerintah, pihak keamanan, LSM, media dan kelompok yang terdampak dari konflik tersebut
Pihak-pihak / stakeholder yang terlibat	
Perkembangan proses mitigasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik tersebut	
Tantangan dan dilemma yang harus dihadapi dalam menyelesaikan konflik tersebut	
Permasalahan keamanan yang muncul dalam proses mitigasi konflik tersebut	

Meskipun dinilai kredibel, informasi yang diperoleh harus dianalisis secara independent oleh tim investigasi agar dapat menyaring informasi yang *hoax*, ambigu atau tidak jelas. Tim investigasi dapat melakukan *assessment* sederhana terhadap informasi yang diperoleh. Tim dapat mengisi tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Panduan Asesmen Kualitas Informasi

Kriteria kualitas	Kualitas buruk (0)	Kualitas diragukan (1)	Kualitas bagus (2)	Kualitas terbaik (3)
Pengetahuan dan integritas dari informan				<i>LSM yang memberikan informasi dinilai</i>

				<i>kompeten dan memiliki akses kepada kubu-kubu yang bertikai</i>
Kronologi peristiwa (Chain of Custody)			<i>Kronologi informasi tidak akan lebih valid apabila narasumber hadir langsung di lokasi</i>	
Kejelasan informasi		<i>Data tidak cukup jelas (Tidak ada dokumentasi mengenai perkembangan konflik)</i>		
Informasi telah diverifikasi oleh pihak ketiga yang kredibel				<i>Observasi dari Komnas HAM memperkuat validitas informasi yang diperoleh</i>

Dari penilaian di atas, kemudian dilanjutkan dengan pemberian bobot nilai dari berbagai informasi yang diperoleh. Pembobotan tersebut dapat dilakukan pada tabel seperti di bawah ini.

Tabel 3.3 Contoh Pembobotan Kualitas Informasi

INFORMASI	Sumber	Kronologi	Kejelasan	Verifikasi	Total Nilai
<i>Pemukulan beberapa orang dari satu kubu oleh kubu lain</i>	3 <i>(Saksi langsung)</i>	2 <i>(Kronologi ada yang kosong)</i>	3 <i>(Waktu dan lokasi kejadian jelas)</i>	0	8
<i>Penyiksaan pelaku oleh polisi</i>	1 <i>(rumor)</i>	2 <i>(kronologi tidak jelas)</i>	1 <i>(Lokasi tidak diketahui)</i>	0	4
<i>Pencurian ternak kubu A oleh oknum kubu B</i>	3 <i>(Saksi langsung)</i>	3 <i>(Kronologi dan bukti ada)</i>	3 <i>(Waktu dan lokasi kejadian)</i>	3 <i>(Informasi diverifikasi oleh)</i>	12

			<i>jelas)</i>	<i>kepolisian)</i>	
--	--	--	---------------	--------------------	--

Apabila total nilai yang diperoleh mencapai 12, maka informasi tersebut dinilai berkualitas dan dapat menjadi pegangan kuat bagi tim dalam menyusun strategi mitigasi dan negosiasi dengan kubu-kubu yang bertikai.

Apabila ada beberapa informasi yang nilainya di bawah 12, maka tim diharuskan:

- Mencari informasi tambahan dari sumber terpercaya sebelum menyusun laporan saran tindak
- Mengesampingkan informasi yang dinilai buruk agar tidak memberikan rekomendasi yang keliru
- Tetap munculkan informasi yang dinilai masih diragukan, namun tekankan pemberian informasi dan rekomendasi pada informasi yang dinilai berkualitas.

III. 8. 3. Analisis Fakta dan Norma (*Island of Agreement*)

Dalam penanganan konflik sosial hanya bisa diperoleh dengan pengalaman dalam mengamati fakta di masyarakat dan pemahaman tentang norma-norma yang berlaku di wilayah tersebut. Fakta dan norma ini membentuk pemahaman tim dalam memandang realita yang terjadi di masyarakat. Fakta dan norma ini juga membentuk visi tim tentang bagaimana realitas dapat ditafsirkan orang lain agar sesuai dengan yang diharapkan tim.

Fakta dan norma akan membentuk cara pandang manusia tentang realita kehidupan. Sedangkan cara pandang ini menjadi sangat penting dalam menengahi berbagai perselisihan atau konflik. Kubu yang berkonflik pasti memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat permasalahan diantara mereka. Untuk itu, salah satu tujuan dari modul ini adalah menawarkan instrumen agar tim investigasi dapat lebih mudah memahami pembacaan realita oleh kubu-kubu yang saling bertikai, dan menemukan titik tengah di antara mereka agar kubu yang berseteru ini dapat memulai diskusi dan menemukan solusi atas permasalahan diantara mereka.

Investigasi konflik tidak hanya tentang cara meluruskan fakta yang telah bias oleh norma sosial politik, budaya dan agama dari pihak yang bertikai, namun juga tentang bagaimana memahami perbedaan “realitas” yang dirasakan oleh masing-masing pihak terkait konflik

diantara mereka. Dalam setiap proses menggali informasi, setiap pihak akan berupaya untuk mengesampingkan cara pandang (persepsi) pihak lawan tentang fakta dan norma sosial terkait konflik diantara mereka. Masing-masing pihak akan berupaya untuk memaksakan cara pandang mereka tentang konflik yang terjadi kepada tim investigasi sehingga informasi yang diperoleh akan bias oleh persepsi tersebut.

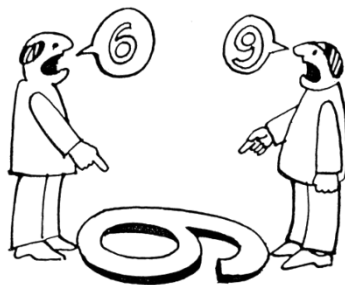
Untuk itu, dalam memahami lebih sistematis bagaimana fakta dan realita ini bekerja di antara kubu yang bertikai, maka tim investigasi perlu menyusun sistematika kualifikasi Fakta dan Norma seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Kualifikasi Fakta dan Norma

	RUANG KESEPAKATAN YANG HARUS DITEMUKAN		
Fakta yang diperdebatkan	Fakta yang disepakati	Norma Konvergen	Norma Divergen
Informasi yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan bukti faktual di lapangan	Poin-poin kesepakatan yang dapat diangkat bersama untuk memulai dialog dalam mencari solusi	Norma-norma yang harus digarisbawahi sebagai nilai konvergen, atau nilai dan norma yang sama-sama dimiliki	Norma-norma yang berbeda antar kubu yang perlu dinegosiasikan

Fakta yang Diperdebatkan:

Merupakan fakta-fakta yang benar-benar terjadi, namun karena sudut pandang yang berbeda, maka ada persepsi yang muncul pun berbeda pula.



Fakta yang Disepakati:

Merupakan fakta-fakta di lapangan yang mana kedua belah pihak yang bertikai memiliki sudut pandang yang sama dan menyepakati bahwa realita tersebut benar terjadi.

Norma Konvergen:

Norma yang sama-sama berlaku diantara pihak yang bertikai. Kubu-kubu yang berseteru memiliki norma dan menganut nilai yang sama terhadap suatu permasalahan.

Contoh: Kedua kubu sama-sama memiliki norma bahwa anak-anak dan perempuan tidak boleh disakiti.

Norma Divergen:

Masing-masing kubu yang bertikai memiliki norma dan menganut nilai yang berbeda dalam memandang suatu permasalahan. Di satu kubu menganggap bahwa sikap tertentu adalah hal yang biasa, namun di kubu lain, sikap tersebut bisa dianggap tidak sopan dan melecehkan.

Contoh: Di budaya tertentu, memanggil orang tua dengan sebutan nama dianggap biasa, namun di budaya lain, panggilan nama tersebut bisa dianggap kurang ajar dan menghina.

Berikut di bawah ini contoh dalam mengisi tabel di atas

	RUANG KESEPAKATAN YANG HARUS DICARI BERSAMA		
Fakta yang diperdebatkan	Fakta yang disepakati	Norma Konvergen	Norma Divergen
Ada 13 orang di kubu A yang dipersekusi oleh kubu B. Sedangkan di kubu B ada 10 orang yang dilecehkan oleh kubu A	Orang-orang di Kubu A dan di kubu B sama-sama ada yang persekusi dan dilecehkan.	Kubu A dan Kubu B sama-sama memiliki norma bahwa setiap kubu berhak membangun rumah ibadah masing-masing.	Kubu A yang merupakan pendatang menganggap bahwa tidak boleh ada kubu lain yang menolak mereka untuk membangun rumah ibadahnya sendiri. Sedangkan kubu B yang merupakan pribumi merasa berhak menolak orang-orang dari luar daerah mereka untuk datang dan membangun rumah ibadah di kampung halaman mereka

III. 9. Contoh Kasus

Dimensi Kasus	: Dimensi Kebangsaan
Kasus	: Radikalisme, Ekstrimisme, dan Terorisme
Lokasi	: Bandar Lampung
Waktu Kejadian	: Juni 2022
Pihak yang bertikai	: Khilafatul Muslimin VS Indonesia
Sumber Konflik	: Konflik Nilai
Wujud konflik	: Konflik terbuka
Level konflik	: <i>Contest</i>
Siklus Resolusi Konflik	: <i>Rising Tension</i>
Kronologi kasus	:

Khilafatul Muslimin adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1997 oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada saat di penjara karena kasus NII dengan cara membuat maklumat dan menuliskannya kedalam secarik kertas. Salah satu alasan Abdul Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin untuk meneruskan kekhilafaan nabi nomor 105.

Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pimpinan tertinggi organisasi (Amirul Mu'minin) menganggap dirinya sebagai penerus Kekhalifahan Nabi (Khalifah nomor 105) pascameninggalnya Rasulullah SWT. Abdul Baraja telah dibantu oleh tiga orang yang tersebar di beberapa daerah untuk mendirikan Khilafatul Muslimin ini. Termasuk menyebarkan ajaran-ajaran khilafah di Indonesia.

Secara hierarki, Abdul Qadir Hasan Baraja selaku Khalifah atau Amirul Mukminin dibantu oleh 3 Amir Daulah yang membawahi seluruh wilayah Nusantara meliputi Amir Daulah Wilayah Jawa, Amir Daulah Wilayah Sumatera (membawahi juga Kalimantan) dan Amir Daulah Wilayah Indonesia Timur.

Penyidik Polda Metro Jaya menemukan fakta Khilafatul Muslimin memiliki visi-misi mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Oleh karena itu, Pimpinan tertinggi Organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap dan telah menyandang status sebagai tersangka. Penangkapan itu berkembang ke lima orang lain. Sehingga, Polda Metro Jaya secara keseluruhan telah menindak 6 orang terkait Organisasi Khilafatul Muslimin.

Di mana ke semua orang yang ditangkap ini adalah merupakan orang-orang yang memiliki peran di dalam Organisasi Khilafatul Muslimin yang mana memiliki tujuan mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi khilafah. Keenam tersangka ditangkap di beberapa lokasi. Tiga diantaranya ditangkap di Wilayah Lampung.

	RUANG KESEPAKATAN YANG HARUS DICARI BERSAMA		
Fakta yang diperdebatkan	Fakta yang disepakati	Norma Konvergen	Norma Divergen
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ingin menerima sistem kebangsaan bernegara Indonesia • Ingin membentuk sistem pemerintahan sendiri / khalifah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama ingin menjalankan ajaran agama dengan benar • Sama-sama ingin memperoleh kedamaian 	Sama-sama menganggap bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah benar	Membuat sistem pemerintahan sendiri

MODUL IV ANALISIS PETA RISIKO KONFLIK SOSIAL

IV. 1. Deskripsi

Pemetaan Risiko (*Risk Map*) merupakan tahap identifikasi sistematis tingkat kerawanan risiko di suatu daerah yang rawan akan konflik. Pemetaan Risiko merupakan langkah awal dari intervensi pemerintah dalam melakukan inklusi sosial kepada masyarakat. Inklusi sosial merupakan proses sosial untuk memperbaiki pola relasional antar kelompok, sehingga kelompok yang tidak merasa aman, dan tidak mampu menjalankan hak asasinya karena perbedaan identitas sosial bisa mendapatkan tempat yang layak di tengah masyarakat, dan membuat mereka tidak lagi termarginalkan, dan dipersekusi.

Pemetaan Risiko merupakan proses analisis (*Mixed-Methods*) yang menggabungkan analisis variabel kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis dari variabel tersebut akan menghasilkan level kerawanan dalam bentuk angka yang lebih objektif dan presisi dari masing-masing daerah, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kemungkinan (*Likelihood*) terjadinya konflik dan level dampak (*Impact*) yang dihasilkan apabila konflik itu terjadi. Hasil dari analisis tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan untuk memprioritaskan daerah yang lebih rentan akan konflik dan daerah yang membutuhkan strategi mitigasi segera.

Pemetaan Risiko umumnya digunakan oleh perusahaan, developer proyek pembangunan, perusahaan Migas dan pertambangan untuk mengidentifikasi tingkat kerawanan dan ancaman yang sifatnya non-teknis di daerah operasional mereka. Analisis ini umumnya bersifat antropologis sosiologis karena harus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, memahami pola sosial budaya, ekonomi dan politik mereka agar bisa diperoleh gambaran lengkap tentang kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional. Gambaran tersebut menjadi data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan pemetaan potensi Ancaman, Tantangan Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis/proyek perusahaan di sana.

Pendekatan Pemetaan Risiko ini kemudian dijadikan sebagai dasar metodologi Religiosity Index yang salah satu tujuannya adalah untuk memetakan tingkat kerawanan konflik yang

terinspirasi oleh agama di seluruh Indonesia. Pemetaan tersebut menjadi landasan untuk Deteksi Dini dan menghasilkan Penanganan Dini agar konflik tersebut dapat mereda.

IV. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus mengenali dengan baik sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Peta Risiko Konflik Sosial adalah para Kakankemenag dapat mengenali proses analisis Peta Risiko, dari menentukan variabel *Likelihood* (Kemungkinan), dan variabel *Impact* (Dampak) dari sebuah konflik. Pengenalan ini sangat diperlukan agar para Kakankemenag dapat mengetahui potensi dan skala kerusakan konflik apabila terjadi di wilayah mereka, dan segera melakukan pemantauan, penyuluhan, koordinasi, negosiasi dan mediasi dalam meredam eskalasi konflik di wilayah mereka.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 4 Analisis Peta risiko Konflik Sosial adalah agar para Kakankemenag:

1. Mengenali secara sistematis tingkat kerawanan risiko sebuah konflik, dapat mengenali proses menyusun analisa pemetaan Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat dan efisien
2. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
3. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
4. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

IV. 3. Topik

Pembelajaran tentang Analisis Peta Risiko Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Metodologi dalam membangun Pemetaan Risiko (*Risk Map*), Variabel pembentuk Risk Map, Indikator Risk Map konflik Keagamaan dan Kebangsaan.
2. Mengajak para Kakankemenag menganalisa studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisa konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan Risk Map

IV. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus

IV. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus

IV. 6. Waktu

Materi Modul 4 dari Training ini dilaksanakan selama satu JPL (45 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit pemaparan materi Analisis Peta Risiko Konflik Sosial oleh pemateri
2. 30 menit Studi Kasus

IV. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Definisi Risk Map, Metodologi Risk Map, Variabel dan Indikator Risk Map	Pemaparan materi
2	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan satu contoh konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan yang pernah terjadi di daerah mereka, atau yang pernah terjadi di Indonesia	Studi kasus

IV. 8. Bahan Bacaan

IV. 8. 1. Metodologi Pemetaan Risiko

Pemetaan Risiko menggunakan pendekatan konsep *Negative/Positive Peace* yang diperkenalkan oleh Johan Galtung, seorang Sosiolog dan Matematikawan dari Norwegia yang dijuluki sebagai *The Father of Peace Studies*. Dalam penjelasannya, *Negative Peace* adalah ketiadaan konflik, ketiadaan ketidakadilan sosial, ketiadaan kekerasan, ketiadaan perbenturan kepentingan, ketiadaan penindasan ekonomi. Jika indikator negatif tersebut banyak ditemukan di tengah masyarakat, maka masyarakat di daerah tersebut makin berpotensi munculnya konflik. Berikut di bawah ini adalah beberapa indikator *Negative Peace* yang dikaitkan dengan dua Dimensi Religiosity Index.

Keagamaan	Kebangsaan
Ancaman kekerasan oleh satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam agama yang sama	Adanya kelompok/organisasi tertentu yang ingin mengubah ideologi kebangsaan bernegara
Keberadaan kelompok takfiri atau menganggap seagama yang berbeda dengan mereka adalah sesat	Adanya narasi pendirian negara baru/separatis/khilafah
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan suatu kelompok agama non-radikal	Adanya narasi, tentang anti terhadap pemerintahan yang sah
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan suatu kelompok agama non-radikal	Adanya kegiatan sosial ekonomi yang melibatkan organisasi terlarang, kelompok anti-negara, dan kelompok separatis

Adanya aturan tertulis yang diskriminatif terhadap suatu kelompok agama non-radikal	Adanya kegiatan politik yang melibatkan organisasi terlarang, kelompok anti-negara, dan kelompok separatis
Adanya sikap diskriminatif oleh kelompok agama terhadap kelompok agama lainnya	
Adanya penindasan ekonomi, kecemburuan sosial dari suatu kelompok agama ke kelompok agama lainnya	

Berbeda dengan *Negative Peace*, *Positif Peace* menekankan pada aspek kebaikan dalam Pemetaan Risiko, baik yang dilakukan dengan sadar maupun tidak. Dalam Pemetaan Risiko di *Religiosity Index* ini, *Positive Peace* mencari tindakan komunal lintas identitas sosial yang dilakukan secara laten ataupun manifes. Jika semakin banyak ditemukannya indikator-indikator positif tersebut pada masyarakat di daerah tertentu, maka level Risiko terjadinya konflik di daerah tersebut akan semakin menurun. Indikator matriks *Positive Peace* ini yang dikaitkan dengan dua Dimensi *Religiosity Index* digambarkan misalnya dalam tabel berikut ini:

Keagamaan	Kebangsaan
Adanya Dialog / saling memahami antar kelompok dalam satu agama yang sama / dengan kelompok dari agama yang berbeda	Adanya organisasi /kelompok keagamaan yang terlibat aktif dalam menjaga semangat kebangsaan
Adanya kerjasama antar kelompok dalam satu agama yang sama / dengan kelompok dari agama yang berbeda	Pemerintah daerah rutin mengadakan acara kebersamaan yang merangkul berbagai golongan untuk merawat semangat kebangsaan
Adanya bantuan kemanusiaan/tolong menolong antar kelompok dalam satu agama yang sama / dengan kelompok dari agama yang berbeda	Adanya tokoh agama yang rutin memberikan ceramah terkait dengan cinta tanah air
Adanya sikap saling menjaga / solidaritas antar kelompok dalam satu agama yang sama / dengan kelompok dari agama yang berbeda	Adanya sikap menolak keberadaan kelompok / ideologi yang menentang NKRI dan Pancasila

IV. 8. 2. Variabel Pemetaan Risiko

Dalam membangun Pemetaan Risiko membutuhkan dua variabel utama, yaitu Probabilitas/Kemungkinan (*Likelihood*), dan Dampak (*Impact*). Berikut di bawah ini penjelasannya:

IV. 8. 2. A. Probabilitas / Kemungkinan (Likelihood)

Probabilitas adalah penilaian kualitatif yang menjelaskan seberapa besar kemungkinan suatu permasalahan/konflik akan terjadi. Level kemungkinan tersebut dapat diklasifikasikan dalam lima level yang dibedakan dari tingkat kemungkinan terjadinya:

1. *Rare*: Konflik/perselisihan sama sekali tidak mungkin terjadi (Kemungkinan terjadi kurang dari 0,1%)
2. *Unlikely*: Konflik/perselisihan masih mungkin terjadi, namun kemungkinannya sangat kecil (Kemungkinan terjadi antara 0,1% - 1%)
3. *Possible*: Konflik/perselisihan mungkin dapat terjadi apabila ada eskalasi tiba-tiba (Kemungkinan terjadi antara 1% - 10%)
4. *Likely*: Konflik/perselisihan lebih mungkin terjadi, tinggal menunggu momen pemicu (Kemungkinan terjadi antara 10% - 100%)
5. *Almost Certain*: Konflik/perselisihan pasti akan terjadi dalam waktu dekat (Kemungkinan terjadi pasti 100%)

Penilaian persentase kemungkinan terjadi di atas sangat bergantung dari keputusan bersama dari pihak investigasi yang paham akan kondisi wilayah rawan konflik. Mungkin tim akan menemui tantangan dalam menentukan tinggi rendahnya persentase dari setiap level tersebut, namun lebih baik mempersiapkan diri untuk hal yang terburuk daripada harus menyepelkan fakta yang terjadi di lapangan.

Penilaian level *Likelihood* tersebut akan membantu tim investigasi untuk mengidentifikasi dan untuk menentukan prioritas. Level *Likelihood* sangat bergantung dari indikator *Negative/Positive Peace* yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun variabel *Likelihood* ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus ada variabel kedua yang melengkapi Pemetaan Risiko ini, yaitu variabel Dampak (*Impact*).

IV. 8. 2. B. Indikator Likelihood dalam Religiosity Index

Dalam menentukan tinggi rendahnya level Likelihood dalam dua dimensi Religiosity Index, maka perlu ditentukan indikator-indikatornya. Indikator tersebut dapat berupa Negative Peace dan juga Positive Peace. Berikut di bawah ini indikator dari masing-masing dimensi Religiosity Index:

DIMENSI KEAGAMAAN	
Negative Peace	Positive Peace
Adanya siklus konflik sosial berdimensi keagamaan yang berulang	Adanya pranata adat dan sosial yang memitigasi konflik sosial berdimensi keagamaan
Adanya ormas / kelompok keagamaan yang menganggap sesat /kafir penganut agama tertentu	Adanya kemampuan dan kemauan dari aparat penegak hukum dalam menangani konflik sosial berdimensi keagamaan
Adanya politisasi agama	Adanya kegiatan organisasi keagamaan dalam memitigasi persoalan konflik sosial berdimensi keagamaan.
Adanya diskriminasi oleh masyarakat terhadap penganut agama tertentu	Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan penghormatan dan perlindungan antarumat beragama
Adanya preferensi kegiatan sosial dan ekonomi hanya dengan interumat beragama	Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan penghormatan dan perlindungan interumat beragama
Adanya diskriminasi oleh pemerintah daerah	
Adanya penganut agama tertentu di daerah yang merasa tertekan atau merasa kalah dengan penganut agama lainnya	
Adanya diskriminasi oleh Pemerintah Daerah terhadap penganut agama tertentu	

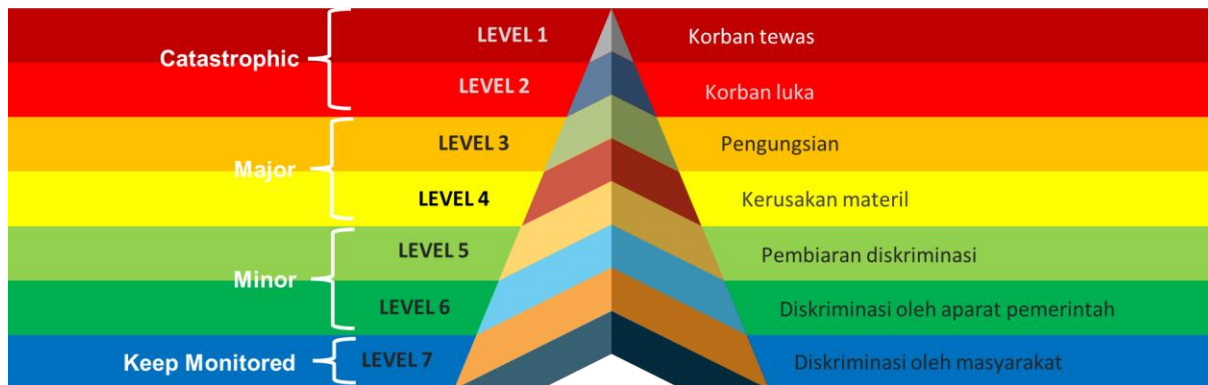
DIMENSI KEBANGSAAN	
Negative Peace	Positive Peace
Adanya siklus konflik sosial berdimensi kebangsaan yang berulang	Adanya pranata adat dan sosial yang memitigasi konflik sosial berdimensi kebangsaan
Adanya masyarakat / Ormas yang bekerja	Adanya kegiatan organisasi keagamaan

sama dengan kelompok radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas	dalam memitigasi persoalan konflik sosial berdimensi kebangsaan
Adanya kampanye politik yang menggunakan simbol-simbol dan/atau melibatkan kelompok radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas	Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan cinta tanah air, memperkuat komitmen kebangsaan dan persaudaraan sesama anak bangsa
Adanya apologi atau pembenaran aksi teror atau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas	
Adanya preferensi kegiatan sosial dan ekonomi dengan kelompok radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas	
Adanya narasi kelompok masyarakat tertentu yang merasa mendapat perlakuan tidak adil / didzolimi oleh pemerintah / aparaturnegara	
Adanya dukungan oleh unsur aparat pemerintah daerah kepada kelompok radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas.	Adanya khotbah / pengajian / pendidikan keagamaan yang mengajarkan prinsip dan sikap cinta tanah air dan memperkuat komitmen kebangsaan
Adanya pembiaran dan/atau ketidakberdayaan aparat negara dan/atau masyarakat dalam menghadapi kelompok radikal, ekstrimis, teroris, separatis, anti-pemerintah atau pengusung politik identitas	

Jika Indikator *Negative Peace* dari kedua Dimensi di atas banyak ditemukan di suatu daerah, maka kemungkinan konflik terjadi di daerah tersebut akan semakin besar. Sedangkan sebaliknya, jika indikator *Positive Peace* banyak ditemukan di suatu daerah, maka semakin kecil kemungkinan konflik itu akan terjadi.

IV. 8. 2. C. Dampak (Impact)

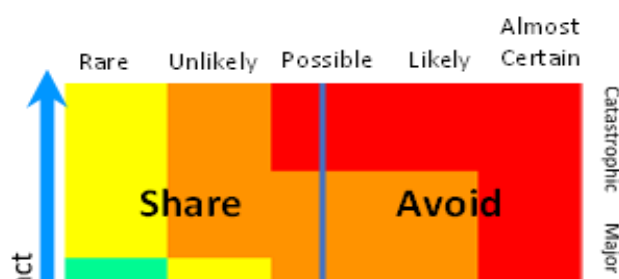
Variabel *Impact* adalah penilaian kuantitatif dari tingkat keparahan yang harus ditanggung semua pihak apabila konflik/perselisihan benar-benar terjadi. Tingkat keparahan ini dapat dibagi menjadi delapan level yaitu:



Berdasarkan level dari *Impact* di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa level dapat ditentukan secara kuantitatif. Variabel *Impact* dari level 1 sampai level 4 dapat berupa angka, seperti jumlah korban Tewas/luka, jumlah pengungsi, dan jumlah bangunan yang dirusak. Tingkat keparahan dari ke empat level tersebut harus menggunakan prinsip “*one is too many*” / satu korban sudah terlalu banyak.

Tujuan dari variabel *Impact* ini adalah untuk menentukan tingkat keparahan apabila sebuah konflik akhirnya pecah di masyarakat. Dari analisa perkiraan tingkat keparahan tersebut dapat dijadikan untuk menentukan prioritas. Permasalahan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan permasalahan mana yang dapat diselesaikan nanti atau bahkan dapat diabaikan.

Dengan mengkombinasikan kedua variabel yaitu *Likelihood* dan *Impact*, maka dapat ditentukan matriks yang terdiri dari empat diagram, yang mana variabel *Likelihood* berada di sumbu X, dan variabel *Impact* berada di sumbu Y. berikut di bawah ini adalah matriks yang dapat dibangun:



Dengan dapat ditentukannya Pemetaan Risiko tersebut, maka tim investigasi bisa mendapatkan skala prioritas. Dengan Sumber Daya Manusia dan finansial yang terbatas, tim dapat memprioritaskan permasalahan mana yang harus dimitigasi terlebih dahulu, dan mana yang mitigasi dimitigasi kemudian.

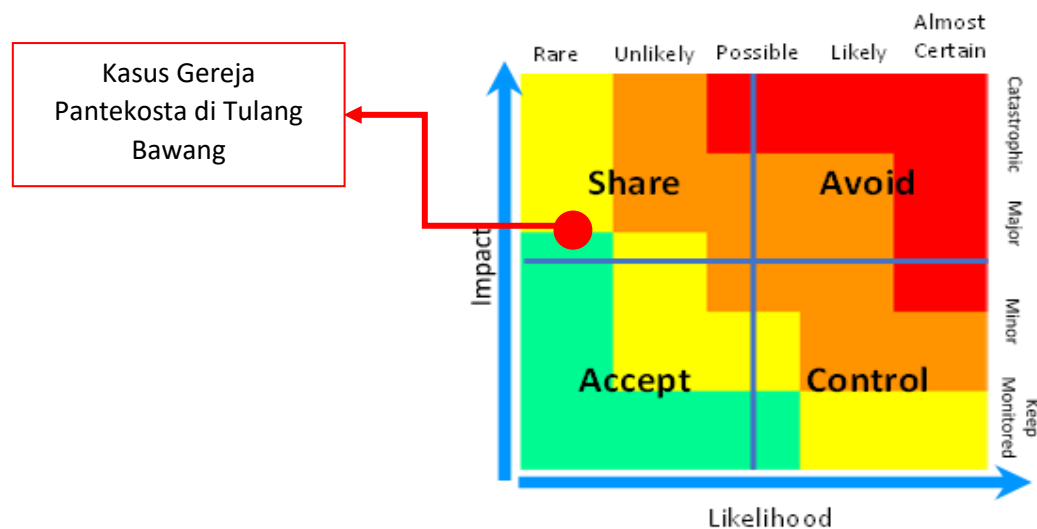
IV. 9. Contoh Kasus

Dimensi Kasus	: Dimensi Keagamaan
Kasus	: Penolakan tempat ibadah dan / atau kegiatan ibadah beda agama
Lokasi	: Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung
Waktu kejadian	: Desember 2021
Pihak yang bertikai	: Gereja Pantekosta Indonesia (GPI) dan warga setempat
Sumber Konflik	: Konflik Nilai
Wujud konflik	: Konflik terbuka
Kategori konflik	: Konflik antar umat beragama
Level konflik	: <i>Disagreement</i>
Siklus Resolusi Konflik	: <i>Rising Tension</i>
Kronologi kasus	:

Peringatan Natal tahun ini di Gereja Pantekosta Indonesia (GPI), Kampung Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai ketegangan. Karena gereja yang belum memiliki izin ini didatangi sejumlah warga yang mempertanyakan operasional gereja.

Peristiwa ini pun viral setelah videonya tersebar luas di jejaring sosial. Tampak dalam video yang diunggah Twitter Komunitas Katolik Garis Lucu @KatolikG, sejumlah orang mendatangi warga yang tengah beribadah di dalam gereja dan berusaha membubarkan peribadatan itu. Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Soumena mengatakan, warga yang datang menanyakan perizinan gereja itu.

Saat melihat situasi mulai tidak kondusif, pihak Polsek dan Koramil melakukan mediasi antara warga dengan pihak gereja. Warga kita di sekitar lokasi gereja mempertanyakan perizinan yang dimiliki, melihat situasi tersebut, kemudian anggota Polsek dan Koramil mengambil langkah penyelesaian dengan melakukan mediasi.



Kasus penolakan Gereja Pantekosta di Tulang Bawang oleh oknum masyarakat dinilai berada di kuadran SHARE. Hal ini karena Dampak yang dihasilkan apabila kasus ini semakin memburuk akan sangat merusak. Oleh karena itu Risiko kasus ini harus di-Share (dibagi) dengan pihak-pihak lain seperti aparat keamanan (Polri, TNI) dan tokoh masyarakat sebagai penengah agar dapat bersama-sama menurunkan eskalasi. Setelah diadakannya mediasi, maka kasus persekusi gereja Pantekosta di Tulang Bawang dihentikan dengan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Upaya Keadilan Restoratif, di hadiri oleh, Waka Polda Lampung, Brigjen Pol. Subiyanto, Irwasda Polda Lampung, Kombes Pol. Sustris Bagus Setiawan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol. Reynold E Hutagalung, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, Kapolres Tulang Bawang, AKBP. Hujra Soumena, Bupati Tulang Bawang, Winarti, FKUB Tulang Bawang, Ketua MUI Tulang Bawang, KH.

Drs. Yantori, Pendeta Sopan Sidabutar, Ketua Adat Kabupaten Tulang Bawang, dan Ahli Hukum.

Waka Polda Lampung, Brigjen Pol. Subiyanto mengatakan, penyelesaian dengan upaya Keadilan Restoratif karena telah terpenuhinya persyaratan formil dan materinya.

“Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung telah melaksanakan gelar perkara dan terpenuhi syarat untuk dilakukan Keadilan Restoratif,” kata Subiyanto, saat ekspose di Mapolda Lampung.

Sementara itu, Bupati Tulang Bawang, Winarti menambahkan, mengucapkan terimakasih kepada petugas Ditreskrimum Polda Lampung atas terlaksananya upaya Keadilan Restoratif. Pihaknya berjanji kedepannya tidak akan terulang kembali.

“Syarat – syarat untuk mendirikan rumah ibadah (Gereja) sudah terpenuhi dan lengkap. Semoga kedepan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama, di Kabupaten Tulang Bawang akan berjalan dengan baik,”imbuhnya.

MODUL V

ANALISIS PETA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KONFLIK SOSIAL

V. 1. Deskripsi

Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Map) merupakan serangkaian analisis mulai dari proses identifikasi, analisis data, pemetaan, dan menentukan prioritas. Memetakan stakeholder menjadi poin yang sangat penting untuk dijalankan. Tujuannya untuk meminimalisir kemungkinan salah strategi pendekatan, miskomunikasi, bias, mispersepsi, multipersepsi, dan tidak tepat sasaran.

Dalam melakukan proses identifikasi, sampai dengan intervensi, tim investigasi senantiasa akan berinteraksi dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, agama, dan kultural dari masyarakat suatu daerah yang akan diteliti. Akan banyak stakeholder dari berbagai sektor yang bersinggungan, dan stakeholder tersebut tentunya memiliki level pengaruh dan kepentingan masing-masing. Pihak yang tidak diakomodir kepentingannya bisa jadi dapat melakukan aksi-aksi yang dapat memperkeruh suasana.

Tidak mungkin untuk mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder yang ada dalam kelompok-kelompok yang bertikai, maka perlu adanya analisis dan pemetaan stakeholder guna menentukan tokoh-tokoh yang perlu menjadi prioritas, dan siapa saja yang berisik tapi tidak memiliki pengaruh dalam mengubah kondisi, tokoh tersebut hanya cukup dimonitor saja pergerakannya.

V. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus menguasai dengan baik sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Peta Pemangku Kepentingan dalam Konflik Sosial adalah para Kakankemenag dapat menguasai proses dalam membangun analisis Stakeholder Map, dari mulai identifikasi seluruh Pemangku Kepentingan dari kedua belah pihak yang bertikai dan pihak eksternal seperti aparat pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Selain itu, para Kakankemenag diharapkan dapat membaca peta Pemangku Kepentingan secara komprehensif dan dapat menentukan arah rekomendasi Tindakan, melakukan strategi pendekatan kepada stakeholder secara efektif dan tepat sasaran.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam Modul 5 Analisis Peta Pemangku Kepentingan dalam Konflik Sosial adalah

1. Para Kakankemenag menguasai materi dalam mengidentifikasi secara sistematis Level Pengaruh dan Level Kepentingan dari Pemangku Kepentingan pada sebuah konflik, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi strategi pendekatan yang tepat dan efisien
2. Menguasai materi bahwa sistem peringatan dini konflik sosial harus dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
3. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
4. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
5. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

V. 3. Topik

Pembelajaran tentang Analisis Pemetaan Pemangku Kepentingan dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Metodologi dalam membangun Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Map), Variabel pembentuk Stakeholder Map, Indikator Stakeholder Map dalam konflik Keagamaan dan Kebangsaan.

2. Mengajak para Kakankemenag menganalisis studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisis pemangku kepentingan dalam konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan Stakeholder Map

V. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus
5. Lembar Kerja untuk Proses Identifikasi dan Asesmen Kasus konflik

V. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus
3. Identifikasi kasus konflik oleh para Kakankemenag
4. Small Group Discussion
5. Curah pendapat

V. 6. Waktu

Materi Modul 5 dari *Training* ini dilaksanakan selama tiga JPL (135 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit *ice breaking*
2. 30 menit pemaparan materi Analisis Peta Pemangku Kepentingan dalam Konflik Sosial oleh pemateri
3. 30 menit Studi Kasus
4. 30 menit Identifikasi kasus sebuah konflik oleh para Kakankemenag
5. 30 menit Small Group Discussion dan curah pendapat

V. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Definisi Stakeholder Map, Metodologi Stakeholder Map, Variabel dan Indikator Stakeholder Map	Pemaparan materi
3	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan satu contoh konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan yang pernah terjadi di daerah mereka, atau yang pernah terjadi di Indonesia	Small Group Discussion
4	Para Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk menganalisis Pemangku Kepentingan dalam konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan Stakeholder Map. Analisis tersebut menjelaskan Siapakah stakeholder yang paling berpengaruh atau yang paling memiliki kepentingan tapi pengaruhnya dalam dinamika konflik tersebut rendah	Studi kasus
5	Seluruh kelompok diminta untuk menggambarkan secara manual posisi dari masing-masing pemangku kepentingan dalam Stakeholder Map, dan jelaskan alasan mengapa pemangku kepentingan tersebut berada dalam kuadran tertentu	Identifikasi kasus
5	Para Kakankemenag dari kelompok lainnya akan memberi respon, apresiasi, dan refleksi dari hasil Pemaparan Studi kasus dari kelompok lainnya	Small Group Discussion, curah pendapat

V. 8. Bahan Bacaan

V. 8. 1. Metodologi Stakeholder Map

Analisis stakeholder dapat dilakukan dengan melihat lima kriteria. Yaitu, Stakeholder Sekuritisasi (*Securitizing Actor*), ancaman keamanan eksistensial, Kelompok Rentan (*vulnerable group* atau *referent object* (RO), Stakeholder Fungsional (*functional actor*), dan logika ancaman (*logic of threat*).

KRITERIA	PENJELASAN
Stakeholder	merupakan stakeholder utama yang bisa mempengaruhi

Sekuritisasi	kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial.
Ancaman keamanan eksistensial	Dipahami sebagai kondisi yang dianggap membahayakan identitas dan survival dari suatu individu atau kelompok.
Kelompok Rentan	Adalah kelompok atau kumpulan orang yang dianggap oleh Stakeholder Sekuritisasi sebagai kelompok rentan terhadap ancaman keamanan eksistensial.
Stakeholder Fungsional	Merupakan pihak yang mempengaruhi hubungan dinamis antara Stakeholder Sekuritisasi dengan Kelompok Rentan, misalnya media massa.
Logika Ancaman	Sebagai komponen terakhir dari sekuritisasi yang mengandung substansi narasi dan tindakan (<i>speech and act</i>) dari Stakeholder Sekuritisasi mengenai ancaman eksistensial yang sedang mengancam Kelompok Rentan.

Pemahaman Stakeholder Sekuritisasi terhadap kondisi nyata Faktor Struktural, Akselerator, dan Pemicu akan menentukan apakah faktor-faktor tersebut dilihat sebagai ancaman dari luar atau tidak. Apabila Stakeholder Sekuritisasi melihat hal dari luar tersebut sebagai ancaman, maka akan ada pertimbangan dari stakeholder tersebut untuk bertindak. Yaitu apakah akan merespon secara normal dengan menggunakan cara-cara nir-kekerasan atau secara abnormal yaitu dengan kekerasan.

Dalam sekuritisasi, Stakeholder Sekuritisasi membangun logika ancaman yang diterima oleh Kelompok Rentan dengan menggunakan apa yang disebut dengan Narasi Tindakan (*speech act*). Contoh: Ketika terjadi pembunuhan terhadap umat muslim di hari Idul Adha misalnya, sebuah media massa mengeluarkan berita bahwa “pembunuhan dilakukan di hari Idul Adha, sehingga dianggap melukai umat Islam.” Pernyataan tersebut sebenarnya mengandung informasi yang belum dapat dibuktikan. Karena sumber-beritanya tidak diketahui dengan jelas. Namun, bila informasi ini sampai pada Kelompok Rentan dan direspon secara abnormal, maka hal ini akan berimplikasi pada berlanjutnya proses sekuritisasi. lebih jauh lagi, proses sekuritisasi ini akan mendorong terjadinya eskalasi konflik.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi apakah sebuah proses sekuritisasi berpeluang untuk meningkatkan bobot Pemicu dalam risiko konflik. Pertama, sejauh mana tingkat kemampuan Stakeholder Sekuritisasi memobilisasi Kelompok Rentan. Semakin besar kemampuan Stakeholder Sekuritisasi dalam memobilisasi Kelompok Rentan, semakin besar pula tingkat risiko konfliknya. Kedua, relevansi logika Ancaman (*logic of threat*) bagi Kelompok Rentan. bila logika Ancaman yang berkembang tidak mendapat tempat yang signifikan atau tidak

relevan bagi Kelompok Rentan, maka tidak ada peningkatan bobot Pemicu (*trigger*). Ketiga, karakter spesifik Kelompok Rentan. Apakah karakter Kelompok Rentan relevan dengan isu sekuritisasi yang sedang berkembang. Keempat, tingkat peran Stakeholder Fungsional. bila peran Stakeholder Fungsional memiliki signifikansi yang dibutuhkan, maka hal ini dapat meningkatkan bobot Pemicu (*trigger*).

Hasil dari analisis dan deteksi itu dapat berupa sebuah tulisan mengenai analisis potensi konflik. Analisis potensi konflik merupakan sebuah tulisan singkat, hasil analisis cepat (*rapid analysis*) mengenai trend konflik terkini. Ada dua jenis analisis yaitu Analisis Rutin dan Analisis Situasional. Analisis Rutin dibuat secara rutin menurut kebutuhan dinamika konflik di sebuah wilayah. Analisis rutin dapat dilakukan setiap tahun atau setiap 6 bulanan bahkan bisa juga setiap bulan jika memang dibutuhkan. Analisis rutin bertujuan memantau perkembangan trend konflik di lapangan dari waktu ke waktu. Analisis rutin merupakan update data dan update analysis bagi latar belakang konflik. Analisis rutin yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu untuk pembuatan Analisis Situasional. berbeda dengan analisis rutin, analisis Situasional merupakan analisis yang dibuat dalam rangka menyikapi situasi yang mengindikasikan akan adanya eskalasi konflik. Tujuan utama dari analisis Situasional adalah peringatan dan tanggapan dini untuk situasi konflik yang mungkin akan berlangsung. Dalam analisis ini juga disampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk pencegahan konflik.

V. 8. 1. A. Stakeholder Sekuritisasi

Tokoh Politik

Tokoh Agama

Tokoh Adat

Tokoh Pemuda

Tokoh Komunitas

Tokoh lainnya

V. 8. 1. B. Stakeholder Fungsional

Kelompok Politik

Kelompok Agama

Kelompok masyarakat/Adat

Kelompok LSM

Kelompok Profesional

Kelompok Perguruan Tinggi

V. 8. 1. C. Kelompok Rentan

Kelompok Politik

Kelompok Agama

Kelompok masyarakat/etnik

Kelompok Pengangguran/ Pemuda

Kelompok bersenjata

Kelompok lainnya

V. 8. 2. Variabel Stakeholder Map

Proses identifikasi dan analisis level pengaruh serta level ketertarikan setiap stakeholder akan menghasilkan klasifikasi dalam bentuk matriks. Matriks tersebut akan membantu tim untuk merumuskan jenis partisipasi apa yang diharapkan oleh setiap stakeholder tersebut.

Ada dua variabel pembentuk Stakeholder Map yaitu Level Kepentingan (Level of Interest) dan Level Pengaruh (Level of Influence). Berikut di bawah ini penjelasannya:

1. Level Kepentingan

Merupakan penilaian dari berapa besar keterlibatan, ketertarikan, kepentingan dari seorang stakeholder dalam perselisihan / konflik yang sedang terjadi. Semakin tinggi kepentingannya, maka semakin sering stakeholder tersebut terlibat dalam berbagai *event* dalam perselisihan tersebut.

2. Level Pengaruh

Merupakan level kemampuan stakeholder dalam mengubah atau bahkan menghentikan konflik apabila telah terjadi. Level pengaruh tersebut bisa didapatkan dari lima kriteria Stakeholder yang telah dijelaskan sebelumnya.

Stakeholder dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Primary Stakeholder* (Pemangku Kepentingan Utama): Mereka yang terkena dampak / pengaruh terbesar baik positif atau negatif dari konflik atau resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak lain.
2. *Secondary Stakeholder* (Pemangku Kepentingan Sekunder): Adalah mereka yang terkena dampak / terpengaruh secara tidak langsung dari konflik dari pihak yang bertikai atau resolusi konflik yang dihasilkan oleh pihak eksternal seperti pemerintah.
3. *Key Stakeholder* (Pemangku Kepentingan Kunci – yang bisa juga merupakan Primary dan Secondary stakeholders): Adalah mereka yang mempunyai pengaruh signifikan di dalam konflik.

V. 8. 3. Tahapan Analisis Stakeholder

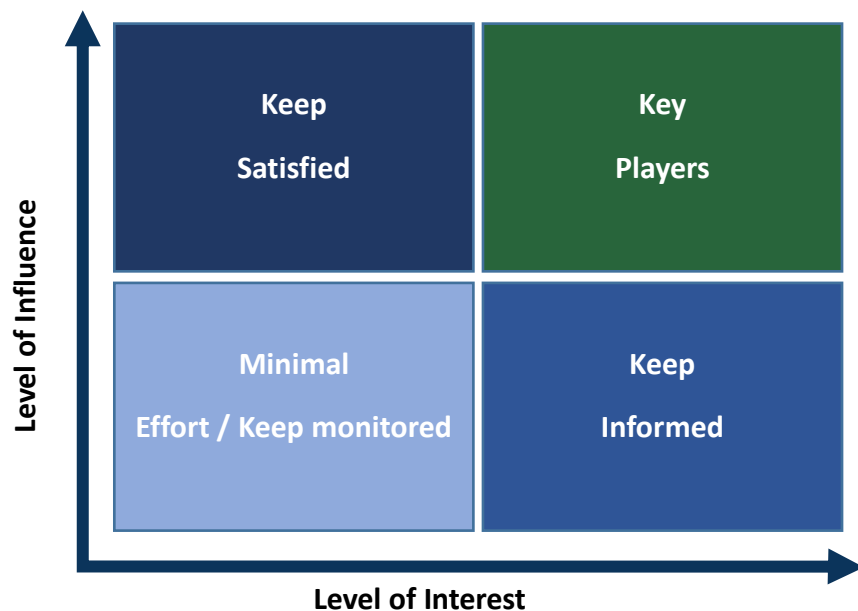
Untuk menganalisis golongan stakeholder tersebut, diperlukan langkah analisis yang sistematis agar dapat menghasilkan klasifikasi stakeholder yang presisi. Berikut dibawah ini tahapan tersebut:

1. Mengidentifikasi semua stakeholder baik dari kedua belah pihak yang sedang bertikai dan juga stakeholder dari luar kedua pihak tersebut seperti aparat pemerintahan, aparat keamanan, dan NGO. Pada sesi ini dilakukan *brainstorming* untuk menentukan siapa saja yang termasuk stakeholder yang ada, baik stakeholder internal maupun eksternal. Jika terjadi perbedaan, maka tugas timlah untuk menentukan apakah hal itu masuk ke dalam stakeholder atau tidak. Intinya, yang menentukan adalah tim sendiri.
2. Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dan kepentingannya (*interest*). Setelah itu, kemudian dilihat seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap konflik. Apakah Tinggi atau Rendah. Demikian juga terhadap level pengaruh yang dimilikinya. Tim harus menentukan apakah termasuk Tinggi atau Rendah.
3. Mengklasifikasikan kepentingan stakeholdernya (menggunakan Stakeholder Mapping). Setelah itu, dilakukan pemetaan dalam stakeholder mapping. Ada empat kuadran sehubungan dengan hasil yang dilakukan di tahap sebelumnya, yaitu: *Monitor (M)*, *Keep informed (KI)*, *Keep Satisfied (KS)* dan *Key Players (KP)*. dari hal

ini dapat dilihat siapa saja yang harus diperlakukan khusus (KP) dan siapa-siapa saja yang cukup dimonitor saja pergerakannya.

4. Mengidentifikasi area konflik antara: Stakeholder vs Stakeholder, Kelompok vs Kelompok, dan Kelompok vs Stakeholder. Kemudian baru dilakukan analisis, siapa saja yang mempunyai area konflik lebih besar.
5. Memprioritaskan, mensinkronkan, menyeimbangkan stakeholder. Jika sudah ditentukan tindakannya, maka barulah bisa diprioritaskan, disinkronkan dan diseimbangkan kebutuhan antar stakeholder dengan kebutuhan mitigasi konflik.
6. Menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi mitigasi konflik, sehingga dengan demikian, dapat diselaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi mitigasi.

Setelah dilakukan tahapan di atas, maka dapat ditentukan di kuadran mana stakeholder tersebut berada. Setiap kuadran memerlukan strategi pendekatan yang berbeda-beda. Jika keliru menentukannya, maka hasil strategi yang diperoleh akan tidak sesuai dengan harapan. Berikut dibawah ini kuadran Stakeholder Map:



Ada empat kuadran dalam stakeholder matriks yang perlu diperhatikan. Pemahaman akan keempat kuadran sangat penting karena akan menentukan perlakuan atau metode/cara apa yang akan dilakukan untuk berkomunikasi dengan para stakeholder ini. Area ini adalah:

V. 8. 3. A. Low Power-Low Interest: Keep Monitored

Kelompok ini tidak (dan tidak diharapkan) untuk secara aktif terlibat dalam mitigasi konflik. Kelompok ini bahkan tidak tahu dan tidak mau tahu lebih terkait potensi konflik. Umumnya stakeholder di kuadran ini lebih memetingkan kepentingannya pribadi, namun tidak memiliki pengaruh dan kekuatan untuk mendapatkannya. Namun, tim tetap harus tahu siapa mereka. tetap Awasi /Monitor pergerakan mereka dan apakah ada kemungkinan mereka untuk berpindah ke kategori ke kuadran lainnya. Setiap stakeholder yang berusaha pindah kuadran umumnya akan melahirkan masalah baru.

V. 8. 3. B. High Power-Low Interest: Keep Satisfied

Kelompok ini adalah kelompok pihak-pihak yang memiliki wewenang dan pengaruh dalam mengambil keputusan. Mereka tidak memiliki kepentingan dan kesediaan untuk terlibat secara aktif dalam mitigasi konflik. Biasanya sulit untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan kelompok ini secara konsisten. Dalam mengelola kelompok ini dibutuhkan strategi keterlibatan proaktif untuk membuat mereka puas/*keep them satisfied*.

V. 8. 3. C. High Interest-Low Power: Keep Informed

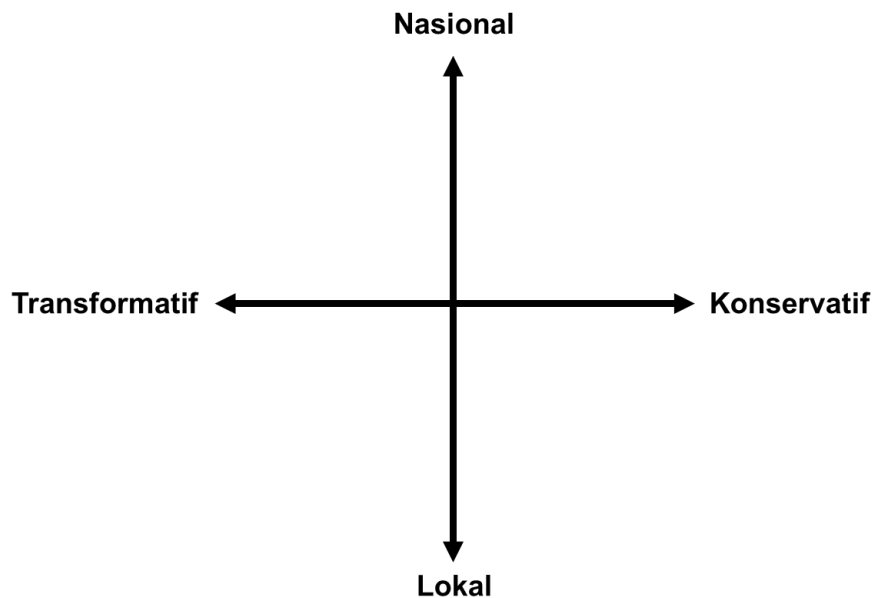
Kelompok ini terpengaruh oleh konflik atau mitigasi konflik yang dilakukan pihak penengah, namun tidak memberi dampak besar pada mitigasi konflik atau memperburuk konflik. Kelompok ini meminta waktu yang lebih banyak daripada yang bisa tim berikan kepada yang kuadran lain. Karena itu penting untuk menemukan cara yang efisien agar membuat mereka terinformasikan / *keep them informed*. Beberapa cara yang bisa digunakan: Jejak Pendapat, Email Updates, Presentasi, Publikasi.

V. 8. 3. D. High Interest-High Power: Manage Closely

Biasanya kelompok ini adalah yang secara langsung maupun tidak langsung terpengaruh dengan konflik, dan mereka memangku jabatan lain yang berwenang mengambil keputusan. Mereka Biasanya mudah diidentifikasi. Kelompok ini sangat penting karena dapat

mengganggu/ mempertahankan/ mengembangkan konflik. Kelompok ini biasanya mudah dilibatkan/*actively engage* dengan cara memberlakukan komunikasi yang transparan dan konsisten.

V. 8. 4. Analisis Perilaku dan Eksposur Pemangku Kepentingan



Sumbu horizontal: Mendistribusikan para pemangku kepentingan berdasarkan pandangan mereka tentang isu negosiasi dari perspektif transformatif ke konservatif relatif terhadap perspektif mitra.

Sumbu vertikal: Mendistribusikan para pemangku kepentingan berdasarkan karakteristik eksposur mereka dari aktor nasional ke aktor lokal, relatif terhadap perspektif pihak lawan.

V. 9. Contoh Kasus

Dimensi Kasus	: Dimensi Keagamaan
Kasus	: Persoalan keagamaan lainnya
Lokasi	: Gosoma, Tobelo, Maluku Utara
Waktu kejadian	: Maret 2016
Pihak yang bertikai	: Pondok Pesantren Alkhairaat vs kerusuhan antar kelompok
Sumber Konflik	: Konflik Kepentingan

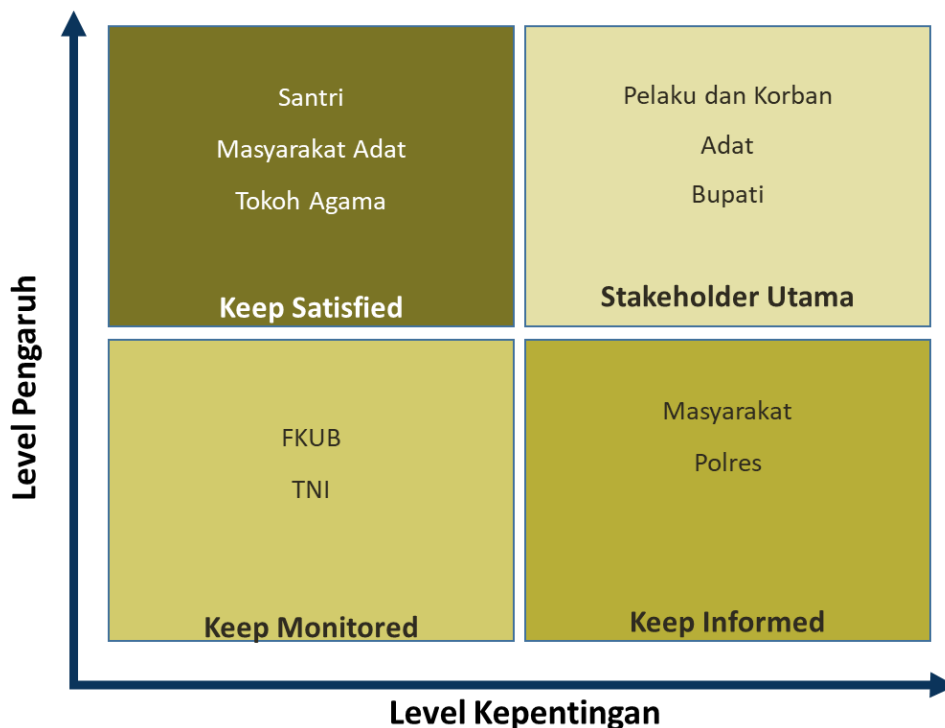
Wujud konflik : Konflik terbuka
 Kategori konflik : Konflik antar umat beragama
 Level konflik : *Fight / Flight*
 Siklus Resolusi Konflik : *Outbreak of Violence*
 Kronologi kasus :

Bentrokan yang terjadi antardua kelompok pemuda di kecamatan Tobelo telah membuat sebuah pondok pesantren di Halmahera Utara menjadi korban amukan api. Pengurus Pondok Pesantren Al Khairaat Wilayah Provinsi Maluku Utara mendesak kepolisian mengusut aksi yang dinilai sebagai pembakaran pesantren di Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Halut) saat bentrokan antarkelompok pemuda pada Senin tanggal 28 Maret 2016.

Pembakaran Pondok Pesantren Al Khairaat menjadi bukti masih buruknya upaya aparat keamanan meminalisasi konflik dan kejadian itu bahkan terkesan ada pembiaran dan kelengahan yang luar biasa dari aparat keamanan.

Pembakaran pondok pesantren terjadi beberapa saat setelah bentrokan antara kelompok pemuda dua desa di Kecamatan Tobelo. Lokasi bentrokan memang tidak jauh dari lokasi pondok pesantren dan seluruh bangunan yang dipergunakan untuk ruang belajar hangus terbakar. Bahkan, masjid dan asrama santri pun ikut dirusak, akibatnya aktivitas di pondok pesantren, termasuk kegiatan belajar dan mengajar terhenti karena harus diliburkan tanpa batas waktu yang jelas. Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara telah menyiapkan dana Rp1 miliar untuk membangun kembali Ponpes Al-khairaat Tobelo.

Berdasarkan analisis Peta Pemangku Kepentingan, pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan perhatian terhadap kasus ini antara lain sebagai berikut:



Dalam penyelesaian kasus ini, pelaku, korban, pranata adat dan bupati sangat berperan dalam menurunkan eskalasi konflik. Sedangkan pihak keamanan (Polisi) berada dalam kuadran Keep Informed karena memiliki Kepentingan yang tinggi sebab peringatan dari Kapolda Maluku Utara agar kasus ini dapat diselesaikan dalam tiga bulan. Apabila tidak, Kapolres Halmahera Utara akan dicopot. Namun pengaruh Polres dalam kasus ini tergolong rendah dan tidak signifikan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Peran FKUB juga dinilai tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh dalam menahan kerusuhan tersebut tidak diseret ke dalam kerusuhan antar umat beragama.

MODUL VI

ANALISIS JEJARING PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM KONFLIK SOSIAL

VI. 1. Deskripsi

Jejaring Pemangku Kepentingan atau Jejaring Pemangku Kepentingan merupakan sebuah *Relationship Research* antar Pemangku Kepentingan yang terikat satu sama lain melalui hubungan sosial. Hubungan tersebut dapat dianalisa pola struktural dan tren interaksi dengan stakeholder yang lain. Bagaimana seorang stakeholder diposisikan dalam hubungannya dengan yang lain, bagaimana dia mempengaruhi atau dipengaruhi oleh stakeholder lain, dan apa kepentingan stakeholder tersebut yang sebenarnya dalam jejaringnya dengan yang lain. Apakah dia memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak?

Jejaring Pemangku Kepentingan berguna untuk memahami bagaimana cara orang terlibat atau menjalin hubungan satu sama lain. Menyelidiki kepentingan, karakteristik, dan menemukan kekuatan potensial dari masing-masing stakeholder yang bisa dimanfaatkan untuk mitigasi konflik.

VI. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam menjalankan sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan dalam Konflik Sosial adalah para Kakankemenag dapat menguasai proses yang harus dilalui untuk membangun analisa Jejaring Pemangku Kepentingan (Stakeholder Network). Bagaimana tingkat kepopuleran seorang stakeholder

dalam hubungan dengan stakeholder yang lain, seberapa kuat jejaring seorang stakeholder dalam kasus konflik tertentu.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 6 Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan dalam Konflik Sosial adalah:

1. Para Kakankemenag memiliki penguasaan materi tentang mengidentifikasi secara sistematis jejaring para stakeholder dan membangun rencana taktis pendekatan dalam menjalankan negosiasi dengan pihak yang bertikai.
2. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
3. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
4. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

VI. 3. Topik

Pembelajaran tentang Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Metodologi dalam membangun analisa Jejaring Pemangku Kepentingan (Jejaring Pemangku Kepentingan), Variabel pembentuk Jejaring Pemangku Kepentingan, Indikator Jejaring Pemangku Kepentingan dalam konflik Keagamaan dan Kebangsaan.
2. Mengajak para Kakankemenag menganalisa studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisa jejaring pemangku kepentingan dalam konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan Jejaring Pemangku Kepentingan.

VI. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan para Kakankemenag memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap para Kakankemenag)

3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap para Kakankemenag membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus
5. Lembar Kerja untuk Proses Identifikasi dan Asesmen Kasus konflik

VI. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus
3. Identifikasi kasus konflik oleh para Kakankemenag
4. Small Group Discussion
5. Curah pendapat

VI. 6. Waktu

Materi Modul 6 dari *Training* ini dilaksanakan selama tiga JPL (135 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit *ice breaking*
2. 30 menit pemaparan materi Analisis Jejaring Pemangku Kepentingan dalam Konflik Sosial oleh pemateri
3. 30 menit Studi Kasus
4. 30 menit Identifikasi kasus sebuah konflik oleh para Kakankemenag
5. 30 menit Small Group Discussion dan curah pendapat

VI. 7. Langkah Pembelajaran

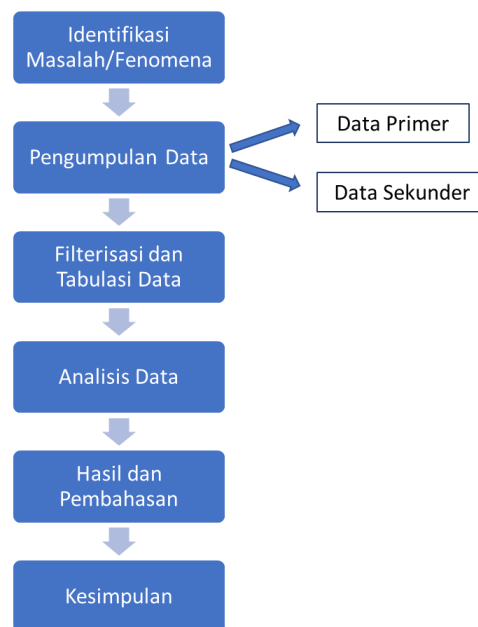
No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Definisi Jejaring Pemangku Kepentingan, Metodologi Jejaring Pemangku Kepentingan, Variabel dan Indikator Jejaring Pemangku Kepentingan	Pemaparan materi
3	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan satu contoh konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan yang pernah terjadi di daerah mereka, atau yang pernah terjadi di Indonesia	Small Group Discussion
4	Para Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk menganalisa Pemangku Kepentingan dalam konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan Jejaring	Studi kasus

	Pemangku Kepentingan. Analisa tersebut menjelaskan jejaring stakeholder tertentu dengan stakeholder yang lain	
5	Para Kakankemenag dari kelompok lainnya akan memberi respon, apresiasi, dan refleksi dari hasil Pemaparan Studi kasus dari kelompok lainnya	Small Group Discussion dan curah pendapat

VI. 8. Bahan Bacaan

Jejaring Pemangku Kepentingan berguna untuk memahami bagaimana cara orang terlibat atau menjalin hubungan satu sama lain. Menyelidiki kepentingan, karakteristik, dan menemukan kekuatan potensial dari masing-masing stakeholder yang bisa dimanfaatkan untuk mitigasi konflik.

Dalam pelaksanaannya, Social Network dapat dijabarkan dalam gambar di bawah ini:



Dalam Tahap Analisis Data, Jejaring Pemangku Kepentingan akan menguji hubungan antar stakeholder melalui tiga tingkatan, yaitu: Degree Centrality; Closeness Centrality; dan Betweenness Centrality. Berikut di bawah ini penjelasannya:

1. *Degree Centrality*: Tingkatan yang mencirikan stakeholder berdasarkan tingkat kepopuleran tertinggi dalam hubungan dengan seluruh stakeholder lainnya, atau

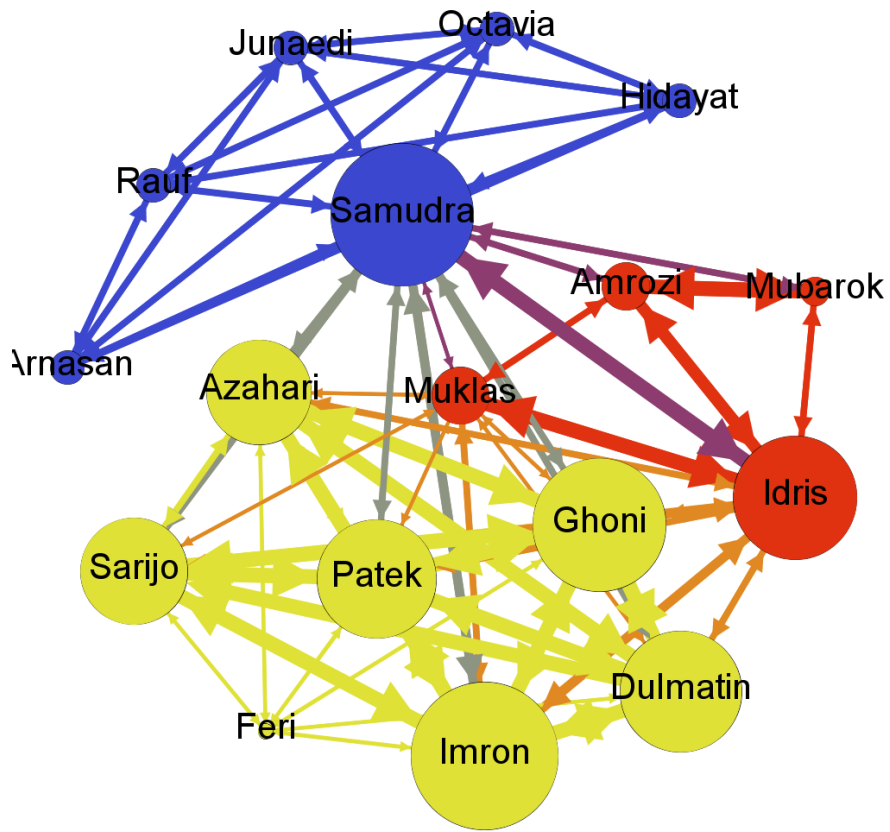
dengan kata lain, semakin sering interaksi stakeholder tersebut dengan stakeholder yang lain, maka semakin tinggi nilai Degree Centrality nya

2. *Closeness Centrality*: Tingkatan yang mencirikan stakeholder berdasarkan hubungan relasional terpendek atau sederhananya stakeholder yang mempunyai jalur tercepat dalam menyebarkan informasi kepada stakeholder lainnya.
3. *Betweenness Centrality*: Tingkatan yang mencirikan stakeholder yang memiliki kemampuan komunikasi relasional yang paling baik, sehingga memungkinkan untuk mengendalikan informasi yang beredar.

Berikut di bawah ini contoh Jejaring Pemangku Kepentingan yang dapat dilihat hubungan antar aktor dan seberapa besar pengaruh setiap stakeholder dalam hubungan seluruh hubungan. Contoh Jejaring Pemangku Kepentingan di bawah ini merupakan hubungan antar stakeholder dalam jaringan Jemaah Islamiyah. Berikut data yang telah diolah menjadi matriks dan Sociogram Matriks hubungan antar Stakeholder dalam jaringan Jemaah Islamiyah pada waktu pemboman Bali I:

	Muklas	Amrozi	Imron	Samudra	Dulmatin	Idris	Mubarak	Azahari	Ghoni	Arnasan	Rauf	Octavia	Hidayat	Junaedi	Patek	Feri	Sarijo
Muklas	0	2	2	1	1	5	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Amrozi	2	0	0	2	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imron	2	0	0	3	5	3	0	5	5	0	0	0	0	0	5	1	5
Samudra	1	2	3	0	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2
Dulmatin	1	0	5	2	0	2	0	5	5	0	0	0	0	0	5	1	5
Idris	5	4	3	5	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	0	2
Mubarak	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Azahari	1	0	5	2	5	2	0	0	5	0	0	0	0	0	2	1	2
Ghoni	1	0	5	2	5	2	0	5	0	0	0	0	0	0	5	1	5
Arnasan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0
Rauf	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	0	0
Octavia	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Hidayat	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0
Junaedi	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
Patek	1	0	5	2	5	2	0	2	5	0	0	0	0	0	0	1	5
Feri	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Sarijo	1	0	5	2	0	2	0	2	5	0	0	0	0	0	5	1	0

Matriks di atas kemudian diolah menggunakan aplikasi Social Network Analysis (SNA) Bernama Gephi. Aplikasi tersebut dapat menghitung Modularity Class, yaitu berapa besar hubungan satu stakeholder dengan stakeholder yang lain sehingga membentuk sebuah cluster, dan Weighted Degree, yaitu Berapa besar hubungan individual satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Di bawah ini adalah Sociogram dari Jejaring Pemangku Kepentingan mereka:



MODUL VII

ANALISIS TIPOLOGI NEGOSIASI DALAM KONFLIK SOSIAL

VII. 1. Deskripsi

Dalam pencegahan konflik, sangat diperlukan adanya strategi agar konflik dapat dihindari, atau walaupun telah terjadi, eskalasi konflik tersebut dapat diredam sehingga tidak menimbulkan korban dan kerusakan lebih buruk lagi. Apabila konflik terjadi, salah satu upaya untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan negosiasi. Negosiasi yang dilakukan tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai, namun dapat juga melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Pada tahap ini, para para Kakankemenag diharapkan mampu melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis negosiasi yang perlu dilakukan kepada masing-masing pihak yang bertikai dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi. Hasil kesepakatan negosiasi yang dicapai dapat pula digunakan sebagai analisis lebih lanjut mengenai hubungan atau relasi antar kelompok yang bertikai setelah konflik selesai.

VII. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus mengerti dengan baik dalam menjalankan sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Tipologi Negosiasi dalam Konflik Sosial adalah para Kakankemenag mengerti dalam menyusun strategi negosiasi secara lebih sistematis. Menempatkan tipe negosiasi sesuai dengan peruntukannya, dan memiliki kemampuan menyusun tim negosiator yang komposisinya sesuai dengan kebutuhan dan tipe kelompok masyarakat yang dihadapi.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 4 Analisis Tipologi Negosiasi dalam Konflik Sosial adalah agar para Kakankemenag:

1. Mengerti tentang berbagai tipe model negosiasi yang dapat digunakan dalam mencegah konflik atau meredam eskalasi konflik agar tidak memburuk
2. Para Kakankemenag mengerti tentang kebutuhan negosiasi sehingga dapat menghasilkan rekomendasi strategi pendekatan yang tepat dan efisien
3. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
4. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
5. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

VII. 3. Topik

Pembelajaran tentang Analisis Tipologi Negosiasi dalam Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang tipe model negosiasi yang dapat dijadikan panduan dalam meredam eskalasi konflik Keagamaan dan Kebangsaan.
2. Mengajak para Kakankemenag menganalisis studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisis dan menyusun rencana taktis dalam melakukan negosiasi dengan pihak yang bertikai

VII. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus
5. Lembar Kerja untuk Proses Identifikasi Kasus konflik

VII. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus

VII. 6. Waktu

Materi Modul 4 dari *Training* ini dilaksanakan selama dua JPL (90 menit) yang terdiri dari:

1. 30 menit pemaparan materi Analisis Tipologi Negosiasi dalam Konflik Sosial oleh pemateri
2. 30 menit Studi Kasus
3. 30 menit Identifikasi kasus sebuah konflik oleh para Kakankemenag

VII. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang tipe model negosiasi yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik Keagamaan dan konflik Kebangsaan.	Pemaparan materi
2	Para Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk menyusun rencana strategis negosiasi dalam melakukan pendekatan dengan pihak yang bertikai. Rencana tersebut disusun menggunakan materi Peta Risiko, Peta Pemangku Kepentingan dan peta Jejaring Pemangku Kepentingan sebagai panduan dalam menyusun taktik	Studi kasus

VII. 8. Bahan Bacaan

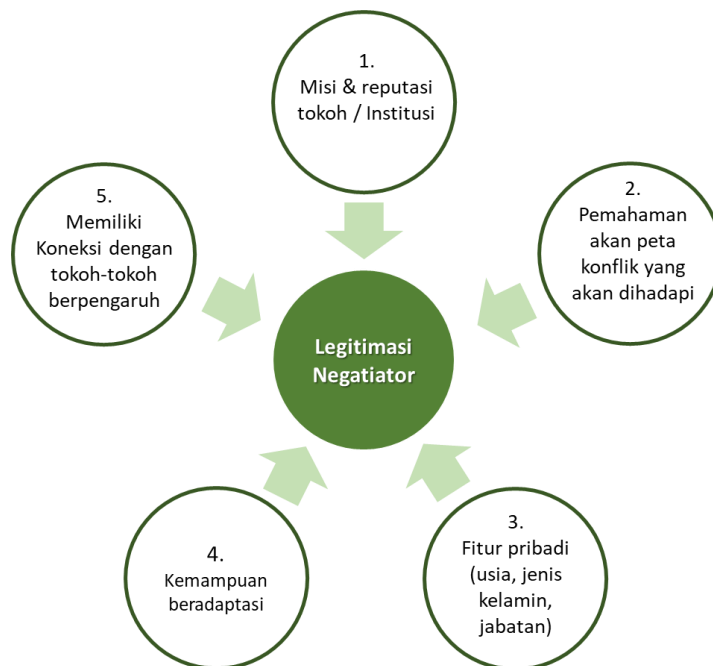
Dalam lingkungan masyarakat yang makin tersegregasi akibat ketegangan yang terjadi di antara dua pihak yang bertikai, peran negosiator secara bertahap bergeser dari yang awalnya berusaha mendapatkan penerimaan dan kepercayaan dari semua pihak, menjadi berupaya mencari cara agar perselisihan yang telah terjadi tidak berkembang menjadi konflik yang semakin merusak.

Umumnya, apabila eskalasi konflik sudah semakin berat, dengan indikator Dampak yang semakin memburuk seperti adanya kerusakan bangunan, atau bahkan telah ada korban, pihak

negosiator semakin sulit mendapatkan akses komunikasi dan informasi dari pihak yang bertikai karena kepercayaan terhadap pihak negosiator menurun dan dinilai lebih mementingkan pihak lawan. Untuk itu, dalam melakukan negosiasi, perlu terlebih dahulu menilai dan memilih komposisi tim negosiator yang tepat.

VII. 8. 1. Legitimasi pihak Negosiator

Sebelum melakukan tahap negosiasi lebih lanjut, pihak negosiator perlu untuk melakukan *self-assessment* tentang bagaimana level legitimasi tokoh-tokoh negosiator dimata pihak yang bertikai. Berikut dibawah ini indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam tim negosiator. Dalam kasus tertentu, komposisi negosiator bisa cukup terdiri atas tokoh-tokoh atau instansi di daerah, tanpa perlu melibatkan tokoh-tokoh nasional. Namun apabila eskalasi konflik sudah sangat buruk, maka keterlibatan tokoh dan instansi nasional, atau bahkan internasional bisa sangat diperlukan.



Indikator di atas sangat perlu dipertimbangan dalam menyusun pihak mana saja yang perlu terlibat dalam tim negosiator. Indikator di atas tidak hanya menjadi pertimbangan dalam memilih komposisi tim, namun juga menjadi landasan tim dalam menyusun strategi komunikasi dan strategi penempatan diri dengan komposisi tim negosiator yang terbatas legitimasinya.

Sebagai contoh, di beberapa daerah, semakin tua umur seseorang, maka semakin dihormati dan semakin kuat legitimasinya sebagai negosiator. Selain itu, umumnya, masyarakat lebih menghormati dan lebih menghargai pendapat tokoh yang memiliki jabatan tinggi dalam

instansi keamanan atau instansi pemerintahan. Selain itu, Kemampuan bersosial, dan kemampuan beradaptasi negosiator serta asset sosial yang dia miliki juga perlu menjadi pertimbangan. Kapasitas dia untuk berbicara dengan orang yang tepat, memiliki jaringan yang luas dengan berbagai tokoh penting dan berpengaruh di daerah, akan semakin meningkatkan legitimasinya di mata pihak-pihak yang bertikai.

VII. 8. 2. Tipe Negosiasi

Adapun dalam melakukan negosiasi, terdapat beberapa kategori negosiasi berdasarkan bentuk hubungan antar kelompok yang berkonflik, seperti:

1. Adversarial Negotiations

Negosiasi tipe adversarial adalah tipe yang melibatkan adanya kekuatan besar pada satu pihak yang berusaha untuk mendapatkan sumber daya atau memperlemah kelompok lainnya. Kasus-kasus yang umum dihadapi oleh negosiasi jenis ini meliputi praktik seperti penculikan, penebusan, dan pemerasan. Tujuan dari dilakukannya negosiasi ini adalah untuk mengakhiri hubungan kekuasaan dengan pihak lainnya dan kembali pada kondisi sebelum konflik.

2. Transactional Negotiations

Tipe negosiasi ini adalah tipe yang paling umum terjadi karena melibatkan nilai yang ditukar antara dua kelompok berdasarkan keinginan mereka. Tipe ini juga bermaksud untuk mencari kesepakatan bersama yang bersifat distributive (win-lose) atau bersifat membagi nilai bersama (win-win).

3. Relational Negotiations

Fokus dari negosiasi tipe relasional adalah membangun dan memelihara hubungan dengan kelompok lainnya dalam kurun waktu yang lama. Tipe ini juga menunjukkan bahwa adanya ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Relational Negotiations seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan dibandingkan dengan tipe negosiasi lainnya.

Berkaca pada beragamnya konflik umat beragama yang terjadi di Indonesia, ketiga jenis negosiasi tersebut bisa saja terjadi. Kemampuan para negosiator untuk mendeteksi jenis negosiasi yang terjadi dapat memberikan analisis lebih lanjut terkait kekuatan dan durasi kesepakatan yang telah tercapai. Hal tersebut kemudian dapat bermanfaat bagi pihak setempat untuk melakukan Tindakan preventif apabila kesepakatan kedua belah pihak tidak bersifat langgeng atau hanya sementara.

Dalam menangani berbagai isu yang spesifik dalam sebuah konflik, ada tiga tipe negosiasi yang umum digunakan, yaitu antara lain sebagai berikut:

NO	Tipe Negosiasi	Isu yang dinegosiasikan	Ruang Bersama yang Dinegosiasikan	Tipe Pendekatan	Level Risiko
1	Politik	Identitas, Nilai, Prinsip, dan Norma yang dianut pihak-pihak yang bertikai	Nilai, Prinsip, dan Norma yang bisa disepakati bersama, dan menemukan konsensus antara kedua belah pihak	Menemukan kesamaan dalam prinsip, nilai yang dianut dan norma antara pihak bertikai, sehingga dapat membuka ruang kesepakatan bagi kedua belah pihak	TINGGI
2	Profesional	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Bagaimana pihak-pihak professional seperti tenaga Kesehatan, tenaga pendidik dan lainlain dapat mengakses pihak-pihak yang dirugikan dalam konflik	Menentukan konsensus bersama terkait metode dan akses agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil dalam mendapatkan akses tertentu	SEDANG
	Teknikal	Operasional berdasarkan fakta dan data mengenai situasi	Berbagi standar operasional terkait dengan logistik, seperti akses Kesehatan, akses Pendidikan dan akses kepada fasilitas keagamaan bagi pihak yang bertikai	Menentukan konsensus bersama terkait metode pemberian logistik atau bantuan	RENDAH

MODUL VIII

ANALISIS MATRIKS POSISI, KEPENTINGAN DAN NILAI DALAM KONFLIK SOSIAL

VIII. 1. Deskripsi

“Memahami konflik sangat PENTING sebelum anda menanganinya secara EFEKTIF. Mengenali dan mengetahui apa yang akan / mungkin terjadi adalah langkah pertama dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Beberapa konflik dapat diantisipasi seluruhnya atau setidaknya dapat dicegah untuk tereskalasi JIKA kita memahami apa yang sedang terjadi dan penyebabnya serta gaya dan sikap kita terhadap konflik.”

- Chuck Bokor -

Salah satu aspek penting dalam melakukan deteksi awal adalah mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan nilai yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang bertikai. Aspek ini sangat berguna sebagai langkah awal untuk melihat apakah terdapat kelompok yang memiliki posisi, kepentingan dan nilai yang saling mengancam satu sama lainnya. Apabila terdapat pertentangan dan muncul potensi terjadinya konflik, penyuluh diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap potensi tersebut. Kerap kali yang terlihat di permukaan hanyalah posisi dari kelompok tersebut, tetapi di balik itu terdapat alasan dan motif yang lebih besar lagi yang membentuk kelompok tersebut memiliki suatu posisi. Sayangnya, alasan dan motif tersebut sulit terlihat secara langsung atau bahkan membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahuinya. Motif tersebut juga dapat terbentuk dari berbagai sumber seperti kitab suci atau kebiasaan atau *custom*.

Nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat tidak lepas dari ideologi yang mereka anut. Ideologi tersebut dikemas dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menjaring banyak pengikut. Narasi tersebut memiliki pola penyebaran dan pola penerimaan yang dapat dipelajari agar dapat dimasukkan ke dalam Sistem Peringatan Dini, sehingga dapat segera diintervensi dan tidak menyebar lebih dalam pada masyarakat.

VIII. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus mengenal sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Matriks Posisi, Kepentingan dan Nilai dalam Konflik Sosial adalah para Kakankemenag memiliki kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana sebuah narasi intoleran, radikal dan bernada kebencian sampai diterima oleh Sebagian masyarakat. Bagaimana narasi tersebut dikonstruksi, tipe-tipe individu dan kelompok masyarakat seperti apa yang berpotensi menerimanya, bagaimana pola narasi tersebut disebar dan fasilitas apa saja yang digunakan agar narasi tersebut berkembang di masyarakat.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 8 Analisis Matriks Posisi, Kepentingan dan Nilai dalam Konflik Sosial adalah agar para Kakankemenag:

1. Para Kakankemenag dapat mengenali pola Matriks Posisi, Kepentingan dan Nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat, sehingga dapat diketahui motif dan tujuan mereka,
2. Meningkatkan kemampuan para Kakankemenag dalam mengenali secara sistematis sebuah konflik dilihat dari perspektif masing-masing kelompok sehingga apabila nilai dan kepentingan kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik, maka dapat segera dilakukan Tindakan pencegahan
3. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
4. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial

5. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

VIII. 3. Topik

Pembelajaran tentang Analisis Matriks Posisi, Kepentingan dan Nilai Dalam Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana memahami posisi suatu kelompok masyarakat dalam konflik Keagamaan dan Kebangsaan, mengidentifikasi Kepentingan yang diperjuangkan dan Nilai yang dianut oleh kelompok tersebut.
2. Mengajak para Kakankemenag menganalisis studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisis bagaimana posisi dari pihak-pihak yang bertikai, Kepentingan yang mereka perjuangkan dan Nilai yang dianut.
3. Mengajak para Kakankemenag untuk menyusun strategi konter-narasi Nilai-Nilai yang dianut oleh kelompok yang memperjuangkan ideologi ekstrim dan berpotensi melahirkan konflik horizontal.

VIII. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus

VIII. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus

VIII. 6. Waktu

Materi Modul 8 dari *Training* ini dilaksanakan selama satu JPL (45 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit pemaparan materi Analisis Matriks Posisi, Kepentingan dan Nilai dalam Konflik Sosial oleh pemateri
2. 30 menit Studi Kasus

VIII. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat bagaimana memahami posisi, Kepentingan dan Nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat yang bertikai	Pemaparan materi
4	Para Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk menyusun rencana strategis konter narasi Nilai-Nilai ekstrim yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat yang dinilai ekstrim dan dapat berpotensi menimbulkan intoleransi dan pertikaian	Studi kasus

VIII. 8. Bahan Bacaan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bebas dari Nilai. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam berperilaku di tengah masyarakat. Nilai sosial adalah konsepsi yang hidup dalam alam pikiran setiap individu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, norma, dan agama. Nilai tersebut lah yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dan menentukan baik buruknya sesuatu.

Nilai tersebut adalah konsensi umum yang diakui dalam kelompok masyarakat tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dengan manusia lainnya, Nilai tersebut akan menyebar baik secara turun temurun, dan juga dinarasikan oleh individu ke individu lainnya. Nilai menjadi standar perilaku suatu kelompok, dan umumnya setiap kelompok akan menganggap nilai yang mereka anut lebih baik dari nilai dari kelompok yang lain.

Untuk bisa memahami nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, maka perlu untuk memetakan Konstruksi Narasi dari nilai mereka anut dan membongkar hubungan saling terkait antara lanskap Nilai, Posisi dan Kepentingan yang ada di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menangkap kompleksitas penerimaan pengaruh paham-paham kekerasan dan

membongkar bagaimana Nilai, Posisi dan Kepentingan mempengaruhi paham tersebut. Berikut di bawah ini pola Konstruksi Narasi.

VIII. 8. 1. Pola Narasi

Kajian terhadap narasi sebagai alat penyebaran ideologi atau nilai membuka peluang untuk memahami potensi pengaruh sebuah gerakan atau paham melalui pola yang lebih luas. Penerimaan seseorang terhadap sebuah ideologi dan gerakan tidak selalu diawali dengan penerimaan secara rasional. Seringkali ketertarikan tersebut muncul diawali oleh pengaruh cerita dan identifikasi emosional melalui narasi. Ketertarikan tersebut kemudian mendorong seseorang untuk berhubungan lebih dekat dengan pihak pembawa pesan, dan selanjutnya si pembawa pesan akan menanamkan ideologi dan nilai yang mereka anut kepada individu yang tertarik tersebut.

Penerimaan narasi bukan berarti audien telah menerima paham ideologi yang terkandung dalam narasi tersebut, namun yang justru memikat mereka adalah konten narasi tersebut yang dikemas dengan sentimen-sentimen yang lekat dengan latar belakang si audien, seperti etnisitas, ketidakadilan, dan viktimisasi umat agama si audien tersebut. Penerimaan narasi merupakan pintu masuk untuk menanamkan ideologi lebih lanjut ke audien.

Narasi adalah gabungan cerita-cerita yang berbeda yang dikombinasikan secara koheren untuk mendukung satu tujuan atau ideologi tertentu dengan memperhatikan emosi dan kondisi audiens. Narasi biasanya mengandung penjelasan terhadap situasi yang tidak diinginkan dan arahan tentang bagaimana mengatasi situasi tersebut. Narasi ekstrim biasanya ditandai dengan penyebutan pembedaan yang tegas atau antagonis antara pihak kawan dan lawan, identifikasi pihak-pihak musuh dengan sifat-sifat atau label yang negatif di satu sisi, dan pemberian nilai kemuliaan terhadap pihak sendiri (*self-fulfilling prophecy*). Hubungan antar pihak kawan dan lawan digambarkan dalam konteks suasana perang yang menuntut upaya eliminasi pihak lawan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara kekerasan (Noorhaidi Hasan, 2013).

Meski terkait erat dengan ideologi, narasi berbeda dengan ideologi. Jika ideologi adalah seperangkat nilai dan konsep atau teori tentang tujuan sebuah gerakan dan cara mewujudkan tujuan tersebut, sedangkan narasi merupakan bentuk penyampaian ideologi agar bisa diterima oleh audiens. Kalau ideologi lebih bersifat normatif, narasi lebih kontekstual dalam bentuk

penggabungan antara situasi kekinian dengan “mitologi” atau sejarah peperangan masa lalu yang bersifat abadi dan universal. Narasi dibangun untuk mendorong penggunaan standar pemahaman yang mengkaitkan situasi yang berbeda atau terpisah. Selain itu, narasi menjanjikan akhir dari proses kejadian ke arah yang berpihak pada kemenangan si pembawa pesan.

VIII. 8. 2. Konstruksi Narasi

Konstruksi narasi ekstrim yang umum ditemukan di lapangan bertujuan untuk memberikan gambaran kompleksitas penerimaan pengaruh radikalisme di tengah masyarakat. Lanskap sosial politik di berbagai segmen masyarakat menjadi landasan dalam membangun strategi komunikasi agar narasi yang disampaikan dapat diterima.

Pada tahap awal, umumnya strategi narasi akan lebih bermain di wilayah ideologi keagamaan yang berupaya meyakinkan audiens supaya menerima ideologi tertentu. Konstruksi narasi ekstrim umumnya tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Banyak yang menentang, namun tidak sedikit pula yang menerimanya. Umumnya, penerimaan narasi terjadi secara bertahap. Di tahap awal, audien mulai menyadari narasi tentang dunia ini sedang kacau, dan sistem yang berlaku di masyarakat sangat buruk dan jauh dari kata ideal, dan solusi dari kekacauan itu hanyalah sistem yang ditawarkan oleh ideologi tersebut.

Selanjutnya audien yang telah terpengaruh mulai menarik diri dari masyarakat terbuka (*Open Society*) dengan membangun pembedaan antara “kami” dengan “mereka”. Identitas berbeda mulai mereka tampilkan, bersamaan dengan penolakan terhadap nilai-nilai yang berbeda dengan mereka. Penolakan tersebut didasari dengan sentimen ideologi yang mereka anut. Setahap kemudian, orang tersebut percaya tentang keharusan perubahan sistem atau menolak orang-orang yang berbeda dengan mereka. Perubahan tersebut harus radikal sebagai jalan memperbaiki semua yang telah kacau tersebut.

Orang-orang tersebut semakin frustrasi menunggu perubahan yang tidak kunjung terjadi, sehingga akhirnya terdorong menyuarakan perlunya penggunaan kekerasan sebagai satu-satunya jalan keluar. Hal ini kemudian bermuara kepada terorisme ketika tentang perlunya penggunaan kekerasan tersebut untuk dimobilisasi secara sistemik dan melibatkan metode yang terstruktur.

Tahapan konstruksi narasi di atas secara berurutan dapat disederhanakan dalam sebuah matriks agar lebih jelas melihat gradasi kekuatan pengaruh ideologi kekerasan yang dilatarbelakangi ideologi.

	Intoleransi	Anti-Sistem	Revolusioner	Kekerasan	Terorisme
Militansi	✓	✓			
Radikalisme	✓	✓	✓		
Ekstremisme	✓	✓	✓	✓	
Terorisme	✓	✓	✓	✓	✓

Komitmen pemerintah dalam mendeteksi setiap gradasi di atas sangat dibutuhkan agar dapat dimitigasi segera sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Berikut di bawah ini bentuk-bentuk narasi ideologi yang berupaya menyampaikan ideologi anti-konsensus kebangsaan, anti pemerintah.





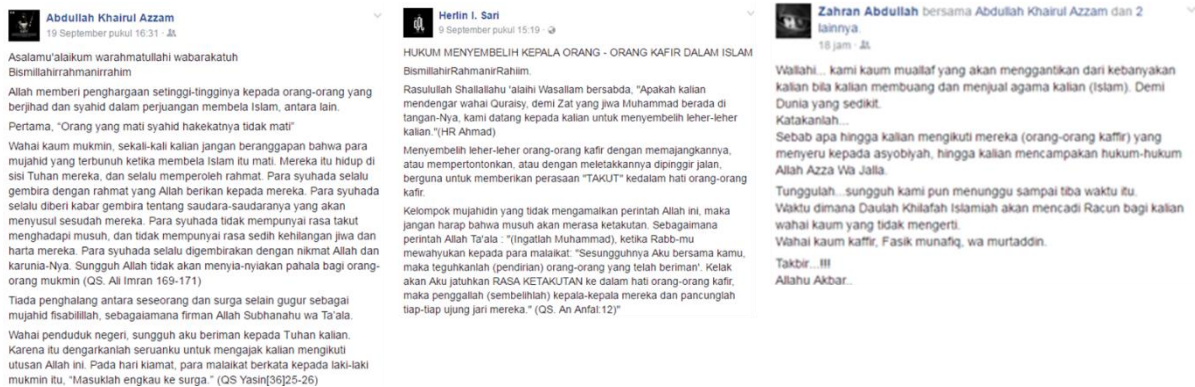
VIII. 8. 3. Pola Penyebaran Narasi

Kajian terhadap narasi membuka peluang untuk memahami potensi pengaruh sebuah gerakan melalui pola yang lebih luas. Partisipasi seseorang terhadap sebuah gerakan tidak selalu diawali oleh penerimaan mereka secara rasional terhadap ideologi sebuah gerakan. Seringkali ketertarikan terhadap sebuah gerakan diawali oleh pengaruh cerita dan identifikasi emosional melalui narasi. Ketertarikan ini bisa mendorong seseorang untuk berhubungan lebih dekat (*engage*) dengan pihak pembawa pesan yang pada tahap selanjutnya akan mendapatkan kesempatan untuk menanamkan ideologi.

Tim negosiator bisa mengidentifikasi dan memetakan pola penyebaran narasi yang memfasilitasi transmisi ideologi intoleran kepada audien dalam bentuk

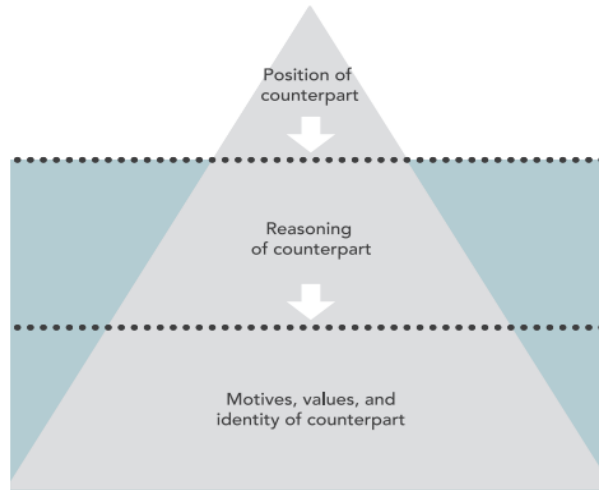
- a. Media (seperti buletin, selebaran, internet);
- b. Ruang atau setting sosial (seperti kegiatan pengajian, khalaqah);
- c. Bentuk-bentuk aksi atau repertoires (seperti demonstrasi, aksi kemanusiaan); dan

mengidentifikasi di mana posisi para informan dalam peta narasi yang ada dan bagaimana mereka sampai pada posisi tersebut.



VIII. 8. 5. Identifikasi Posisi, Kepentingan dan Nilai

Salah satu aspek penting dalam melakukan deteksi awal adalah mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan nilai yang dipegang oleh berbagai kelompok. Aspek ini sangat berguna sebagai langkah awal untuk melihat apakah terdapat kelompok yang memiliki posisi, kepentingan, dan nilai yang saling mengancam satu sama lainnya. Apabila terdapat pertentangan dan muncul potensi terjadinya konflik, para calon trainer diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap potensi tersebut. Berdasarkan Gambar 2.1, kerap kali yang terlihat di permukaan hanyalah posisi dari kelompok tersebut, tetapi di balik itu terdapat alasan dan motif yang lebih besar lagi yang membentuk kelompok tersebut memiliki suatu posisi. Sayangnya, alasan dan motif tersebut sulit terlihat secara langsung atau bahkan membutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahuinya. Motif tersebut juga dapat terbentuk dari berbagai sumber seperti ajaran agama atau kebiasaan atau *custom*.



Gambar 8. 1 *The Iceberg: Analyzing the Position of the Counterpart*

Dalam mengidentifikasi posisi pihak yang bertikai, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan acuan:

- **What**
Pertanyaan ini meliputi posisi secara implisit atau eksplisit terhadap suatu isu dan apa yang menjadi kepentingan dari pihak tersebut dalam isu tersebut.
- **How**
Pertanyaan ini meliputi bagaimana pihak lain berada dalam posisi tersebut. Pada umumnya, jawaban atas pertanyaan ini menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh pihak tersebut yang dapat membantu mereka mendapati posisi tersebut.
- **Why**
Pertanyaan ini digunakan untuk menggali lebih dalam lagi *inner motives* yang dimiliki. Dalam hal ini, jawabannya dapat berupa penggambaran kondisi yang secara tidak langsung menganalisis pemicu munculnya kepentingan pihak tersebut, seperti dendam antar kelompok beragama, perbedaan pendapat, rasa takut, atau kedaulatan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berguna untuk mengidentifikasi posisi serta motif secara mendalam dan bertahap. Para penyuluh diharapkan dapat mengetahui masing-masing *stance* atau posisi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok sebagai pemetaan awal untuk menghindari terjadinya konflik.

MODUL IX

ANALISIS RUANG KESEPAKATAN DALAM KONFLIK SOSIAL

IX. 1. Deskripsi

Ruang Kesepakatan (*Island of Agreement*) merupakan bagian dari Tindakan pencegahan (*Prevention*) untuk membuka ruang negosiasi antara kelompok masyarakat yang bertikai tentang hal-hal yang memungkinkan yang dapat disepakati guna mencegah eskalasi konflik. Analisis ini berdasarkan pada Motif, Kepentingan, dan Nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok yang bertikai. Sehingga tujuan dari Analisis Ruang Kesepakatan adalah mengembangkan rencana taktis untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) Motif, Kepentingan, Nilai dan Posisi dari kelompok masyarakat yang bertikai

Tim negosiator harus memiliki pemahaman terhadap situasi konflik. Bahwa dalam konflik, akan ada dua narasi yang berbeda dan saling berbenturan. Tim negosiator harus jadi penengah yang mampu menghasilkan dialog substantif tentang bagaimana mempertemukan Motif, Kepentingan, Nilai dan Posisi yang saling berbeda diantara kelompok yang berselisih. Dialog tersebut harus menghasilkan kesepakatan yang memiliki dampak dalam menurunkan eskalasi.

IX. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus mengenali sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Analisis Ruang Kesepakatan dalam Konflik Sosial adalah para Kakankemenag dapat

mengenali strategi mitigasi konflik dengan mencari titik temu dan kesepakatan yang dapat diraih bersama antara pihak-pihak yang bertikai secara lebih sistematis.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam modul 9 Analisis Ruang Kesepakatan dalam Konflik Sosial adalah:

1. Para Kakankemenag mengenal tentang teknis dalam membangun Ruang Kesepakatan (Island of Agreement) antara dua kelompok yang bertikai agar dapat mencegah atau menurunkan eskalasi konflik.
2. Meningkatkan kemampuan para Kakankemenag dalam mengenali sistematis sebuah konflik, dilihat dari perspektif masing-masing kelompok sehingga apabila nilai dan kepentingan kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik, maka dapat segera dilakukan analisis Ruang Kesepakatan (Island of Agreement) untuk menemukan solusi terbaik
3. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
4. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial
5. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

IX. 3. Topik

Pembelajaran tentang Analisis Ruang Kesepakatan dalam Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang teknis memahami Posisi, Motif, Nilai dan Kepentingan suatu kelompok masyarakat dalam konflik Keagamaan dan Kebangsaan, dan teknis menemukan ruang kesepakatan diantara ruang perbedaan.
2. Mengajak para Kakankemenag menganalisis studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisis bagaimana posisi dari pihak-pihak yang bertikai, Kepentingan yang mereka perjuangkan dan Nilai yang dianut, dan Ruang Kesepakatan apa saja yang bisa dipertemukan.

IX. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus

IX. 5. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus

IX. 6. Waktu

Materi Modul 9 dari *Training* ini dilaksanakan selama tiga JPL (135 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit pemaparan materi Analisis Ruang Kesepakatan dalam Konflik Sosial oleh pemateri
2. 30 menit Studi Kasus

IX. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat bagaimana memahami Posisi, Motif, Kepentingan dan Nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat yang bertikai dan bagaimana menemukan ruang-ruang kesepakatan dari perbedaan yang ada diantara kelompok tersebut	Pemaparan materi
3	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan satu contoh Posisi, Kepentingan dan Nilai dari kelompok-kelompok masyarakat yang bertikai dalam konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan, dan menemukan Ruang Kesepakatan diantara mereka	Studi kasus

IX. 8. Bahan Bacaan

Tujuan dari Ruang Kesepakatan ini adalah untuk mengeksplorasi ruang-ruang yang berpotensi memiliki Nilai-nilai yang dianut bersama, kemudian mencari solusi dan kesepakatan untuk menurunkan eskalasi atau mencegah konflik terjadi.



Ruang Kesepakatan:

Pada bagian ini, tim negosiasi harus berupaya terlebih dahulu untuk mengidentifikasi nilai-nilai apa yang dianut oleh kelompok masyarakat yang bertikai, motif yang melatarbelakangi kelompok tersebut bertikai serta prioritas dari masing-masing kelompok. Begitu juga dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik dari setiap kubu agar tim investigasi dapat menemukan poin-poin yang bisa disepakati bersama. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk menjadi panduan bagi tim negosiasi dalam menyusun rencana taktis agar dapat menjembatani kesenjangan antara kelompok masyarakat yang bertikai.

Ruang ini tidak hanya terdiri dari kemungkinan-kemungkinan bersama, tetapi juga semua pilihan, termasuk yang tidak disetujui oleh salah satu atau kedua belah pihak. Tujuan dialog antara kedua belah pihak adalah untuk memilah dan memahami preferensi dan keberatan mereka masing-masing. Oleh karena itu, mengidentifikasi area negosiasi melibatkan:

1. Komunikasi posisi masing-masing pihak (P) dan (P');
2. Kemampuan untuk menjelaskan alasan taktis seseorang (R) dan menghubungkannya dengan alasan pihak lawan (R');

3. Keterbukaan untuk mendiskusikan nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari seseorang (V) dalam bahasa dan metode yang mungkin berhubungan dengan nilai-nilai dan identitas pihak lawan (V'); dan,

4. Pengakuan akan adanya jarak antara dua set posisi/metode/nilai-nilai untuk menawarkan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi. Untuk menawarkan kesempatan untuk dialog dan peningkatan pemahaman tentang mitra

Ruang berbagi dalam negosiasi ini, yang dimiliki bersama oleh para negosiator, diharapkan para pihak bersedia untuk menemukan kompromi. Negosiasi harus disajikan sebagai proses bagi para pihak untuk mengeksplorasi cara-cara untuk mendamaikan P, R dan V dengan dan P', R', dan V

Dalam semua kasus, langkah pertama adalah tentang memahami perspektif mitra dan melihat bagaimana mendamaikan kemungkinan perbedaan pada berbagai tingkat keterlibatan. Kembali ke eksplorasi ruang berbagi, modul ini akan fokus pada pencarian sistematis untuk nilai-nilai bersama. Mencari nilai-nilai bersama adalah tentang menemukan titik temu antara struktur kepercayaan kedua belah pihak dan merumuskan kembali nilai-nilai ini ke dalam kosakata bersama.

Hal yang sama berlaku untuk penalaran taktis dan metode-metode profesional yang dapat diukur dengan kapasitas mereka untuk memobilisasi konsensus di antara tim penanganan konflik sosial tentang bagaimana tim harus beroperasi di wilayah terdampak. Ada sejumlah prosedur dan mekanisme yang sangat masuk akal bagi tim tetapi memiliki sedikit resonansi dengan tim. Metode-metode ini perlu dibongkar juga agar menjadi kenyataan, sehingga kedua belah pihak dapat menyepakati cara menangani kebutuhan masyarakat terdampak.

MODUL X

SISTEM DETEKSI DINI KONFLIK SOSIAL

X. 1. Deskripsi

“Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: (a) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c) Meredam potensi Konflik; dan (d) Membangun sistem peringatan dini.”

- Pasal 6 ayat 1, UU No.7 Tahun 2012 –

- (1) *Pemerintah membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.*
- (2) *Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi deteksi dini dan cegah dini.*
- (3) *Deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *Penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;*
 - b. *Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;*
 - c. *Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;*
 - d. *Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan*
 - e. *Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 PP No.2 Tahun 2015 –

Berdasarkan UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, definisi penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Berdasarkan definisi di atas dapat dinyatakan bahwa penanganan konflik terdiri dari tiga rangkaian utama yaitu: Pencegahan; Penghentian; dan Pemulihan. Apabila dijabarkan lebih rinci, bagian Pencegahan Konflik terdiri dari empat elemen utama yaitu:

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat
2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
3. Meredam potensi konflik, dan
4. Membangun sistem peringatan dini

Modul *Early Warning & Response System (Detection)* atau Deteksi merupakan upaya untuk memenuhi kriteria elemen nomor empat. Sedangkan *Modul Early Warning & Response System (Prevention)* atau Pencegahan berusaha memenuhi kriteria elemen nomor dua dan nomor tiga.

Krisis dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak stabil karena perubahan bisa terjadi (Fink, 1986). Krisis umumnya terjadi akibat dari permasalahan kecil yang berkembang menjadi permasalahan besar. Seperti ungkapan yang pernah disampaikan Presiden Amerika Serikat, Benjamin Franklin:

“Karena kekurangan paku, sepatu kuda hilang; karena kekurangan sepatu, kuda hilang; karena kekurangan kuda, penunggang kuda hilang; Karena kekurangan penunggang kuda, pertempuran kalah; Karena kalah pertempuran, kerajaan hilang; dan semua itu hilang hanya karena kekurangan paku sepatu kuda”

Dan bukan saja masalah kecil tumbuh menjadi masalah besar, tetapi keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksinya juga menjadi sangat diperlukan. Ketika dapat mendeteksi masalah lebih awal dan menyelesaikannya, maka ke depannya tidak diperlukan lagi berbagai macam solusi dan program perdamaian yang memakan biaya besar untuk menyelesaikannya. Jika tidak menyelesaikannya sejak dini, maka masalah itu akan destruktif. Hal tersebut menjadi tantangan bagi para pemilik otoritas untuk melihat gejala konflik lebih awal di tengah masyarakat, dan menyadari bahwa konflik itu perlu diatasi ketika masih berupa perselisihan kecil.

Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini, juga lazim digunakan dalam serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dampak kerusakan yang diakibatkan bencana alam. EWS merupakan paradigma baru yang berkembang pada tahun 1980-an. Muncul dan berkembangnya paradigma ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan adanya sebuah cara untuk mencegah terjadinya konflik. Pada awal kemunculannya, EWS ini dikembangkan untuk melakukan deteksi dini di negara-negara Afrika Selatan, Rwanda, dan lain-lain. Akan tetapi, kemudian menjadi wacana internasional setelah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) saat itu, Boutros Boutros-Ghali, pada tahun 1992 mengatakan;

“The cohesion of State is threatened by brutal ethnic, religious, social, cultural or linguistic strife...action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur”.

Jelas sekali bahwa diperlukan sebuah aksi untuk mencegah perselisihan yang terjadi di berbagai pihak, mencegah meningkatnya eskalasi perselisihan dan membatasi penyebaran terjadinya perselisihan.

Pada saat itu, PBB mengembangkan bentuk EWS yang disebut sebagai “*An Agenda for Peace*” dengan membangun cara diplomasi berperspektif pencegahan konflik dan manajemen konflik. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lagi dengan melibatkan para pekerja kemanusiaan, para akademisi, dan lembaga PBB yang kemudian membentuk sebuah proyek riset yang disebut sebagai CEWS (*Conflict Early Warning System*) pada tahun 1993.

Perkembangan *Early Warning System* di Indonesia mulai muncul dan berkembang setelah terjadinya beberapa konflik besar seperti, konflik Maluku, Konflik Kalimantan barat, konflik Poso, Konflik Aceh, konflik Papua dan lain-lain. Bentuk-bentuk EWS yang dikembangkan sangat beragam. Salah satu cara untuk melakukan *early warning* ini adalah dengan melakukan penelitian tentang indikator-indikator yang dapat menaikkan skala eskalasi konflik. Mohammad Zulfan Tadjoedin bersama UNSFIR (*United Nation Support Facility for Indonesia Recovery*) juga telah melakukan apa yang disebut sebagai *early warning system*. Dengan menggunakan basis data media dan diperkaya dengan penelitian oleh para ahli, UNSFIR telah menginspirasi banyak pihak untuk segera bertindak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan konflik.

Bentuk *early warning* lain dilakukan oleh *World Bank* dalam melakukan monitoring terhadap situasi keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) setelah disepakatinya MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Monitoring yang dilakukan *World Bank* ini dilakukan secara berkala, yaitu setiap satu bulan dengan mengambil basis data dari media massa yang beredar di NAD. Hasilnya, sangat menginspirasi berbagai pihak untuk mulai bertindak meningkatkan keamanan di NAD guna menjaga kesepakatan damai yang telah dibuat.

International Crisis Groups juga melakukan sebuah cara yang bisa disebut sebagai sebuah *early warning*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap satu isu tertentu di satu kabupaten. Hasil penelitian *International Crisis Group* yang menjadi referensi utama dalam hal konflik dan untuk bertindak dalam melakukan kerja-kerja perdamaian.

Beberapa contoh di atas adalah salah satu bentuk *Early Warning* yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga, akan tetapi *Early Warning* masih dinilai belum terlihat secara langsung. Dengan adanya *Early Warning* itu sendiri masih dirasa belum cukup untuk mencegah

terjadinya konflik. Perubahan situasi konflik yang sangat cepat, membutuhkan sebuah *Early Warning* dan *Early Response* yang sangat cepat pula untuk memotong eskalasi konflik. Untuk itu, dikembangkan sebuah mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

X. 2. Tujuan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kakankemenag) akan bertugas sebagai koordinator tim yang akan menyuplai peringatan dini konflik sosial berdimensi Keagamaan di wilayah mereka. Tim tersebut juga akan mengendalikan operasi sistem operasi Peringatan Dini, melakukan pemantauan, dan juga melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Provinsi. Untuk mengemban tugas tersebut, Kakankemenag harus menguasai sistem tersebut bersama dengan tim di bawah mereka. Untuk itu, tujuan dari modul ini dalam pengembangan kemampuan Kakankemenag adalah sebagai berikut.

Secara umum, tujuan yang diharapkan setelah para Kakankemenag mempelajari materi Sistem Deteksi Dini Konflik sosial adalah para Kakankemenag dapat menguasai apa saja level konflik dan di level mana level konflik yang terjadi di wilayah mereka. Selain dapat memahami level konflik, para Kakankemenag juga diharapkan dapat menyusun strategi yang sesuai dengan level konflik tersebut, karena beda level, beda strategi mitigasinya.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang diharapkan dalam Modul 10 sistem Deteksi Dini Konflik Sosial adalah:

1. Para Kakankemenag menguasai tentang pola Sistem Deteksi Dini dan dapat memetakan potensi konflik keagamaan dan kebangsaan di di wilayah mereka
2. Para Kakankemenag dapat menguasai Teknik mengidentifikasi dan mendeteksi secara sistematis sebuah potensi konflik di daerah mereka sebelum berkembang menjadi konflik yang berdampak buruk
3. Memahami manajemen Deteksi Dini dan Cegah Dini yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: Tim Nasional; Tim Provinsi; Tim Kabupaten/kota; dan Tim Kecamatan
4. Memahami proses pemantauan dan pelaporan situasi konflik secara berkala dan / atau sewaktu-waktu kepada sistem Deteksi Dini Konflik Sosial

5. Mampu mengendalikan operasi sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Keagamaan dan Kebangsaan dari tingkat Kecamatan sampai dengan level Kabupaten/Kota

X. 3. Topik

Pembelajaran tentang Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) Konflik Sosial dilaksanakan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

3. Pemateri memberikan penjelasan singkat tentang Teori dan Metode yang digunakan dalam membangun Sistem Deteksi Dini
4. Mengajak para Kakankemenag menganalisis studi kasus tentang konflik-konflik yang masuk dalam Dimensi Kebangsaan dan Keagamaan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Para Kakankemenag diminta menganalisis indikator-indikator apa saja yang harus dideteksi sebelum kasus konflik tersebut pecah.
5. Mengajak para Kakankemenag untuk menyusun strategi konter-narasi Nilai-Nilai yang dianut oleh kelompok yang memperjuangkan ideologi ekstrim dan berpotensi melahirkan konflik horizontal.

X. 4. Sumber dan Bahan

1. Kompetensi mata pelajaran (pastikan peserta memiliki file-nya)
2. Laptop (setiap peserta)
3. Alat tulis dan buku tulis/*block note* (setiap peserta membawa)
4. Lembar Kerja untuk Studi Kasus
5. Lembar Kerja untuk Proses Identifikasi dan Asesmen Kasus konflik
6. Instrumen pelaporan Sistem Deteksi Dini Religiosity Index yang telah disiapkan oleh tim Pusat

X. 6. Metode Pembelajaran

1. Pemaparan oleh pemateri
2. Studi kasus
3. Small Group Discussion
4. Curah pendapat

X. 6. Waktu

Materi Modul 10 dari *Training* ini dilaksanakan selama tiga JPL (135 menit) yang terdiri dari:

1. 15 menit *ice breaking*
2. 30 menit pemaparan materi Analisis Ruang Kesepakatan dalam Konflik Sosial oleh pemateri
3. 30 menit Studi Kasus
4. 30 menit Identifikasi kasus sebuah konflik oleh para Kakankemenag
5. 30 menit Small Group Discussion dan curah pendapat

X. 7. Langkah Pembelajaran

No	Tahapan	Metode
1	Pemateri memberikan penjelasan singkat bagaimana Teori dan Metode yang digunakan dalam membangun Sistem Deteksi Dini	Pemaparan materi
3	Para Kakankemenag dibagi dalam beberapa kelompok dan menarasikan satu contoh konflik Dimensi Keagamaan dan Dimensi Kebangsaan di Indonesia, dan apa saja indikator-indikator yang ada di masyarakat yang dapat dideteksi	Small Group Discussion
4	Para Kakankemenag dalam kelompok diminta untuk menyusun rencana strategis mencegah eskalasi konflik berdasarkan indikator-indikator Sistem Peringatan Dini tersebut	Studi kasus
5	Para Kakankemenag dari kelompok lainnya akan memberi respon, apresiasi, dan refleksi dari hasil Pemaparan Studi kasus dari kelompok lainnya	Small Group Discussion

X. 8. Bahan Bacaan

X. 8. 1. Teori Tahapan Konflik dan Early Warning

Berdasarkan anatomi, berdasarkan The Five Level of Conflicts yang dikeluarkan oleh Speed Leas, terdapat lima tahapan dari sebuah konflik dapat terjadi yaitu:



(1) Masalah yang Harus Dipecahkan (*Problem to Solve*)

Dalam tahap ini kedua pihak yang bertikai sedang mengalami depresi atau “Kemarahan yang berbalik ke dalam”. Hal ini berarti kedua pihak belum menyadari bahwa mereka sedang berkonflik, karena mereka dalam keadaan depresi akibat situasi.

Untuk itu, pihak otoritas harus meningkatkan kesadaran kedua belah pihak bahwa ada masalah di antara mereka yang harus diselesaikan. Penyelesaian tersebut harus berorientasi pada titik permasalahan, dan bukan pada perorangan.

Pada tahap ini, EWS sudah harus memberikan *warning* kepada pemangku kepentingan untuk segera melakukan Tindakan untuk de-eskalasi konflik

(2) Ketidaksepakatan (*Disagreement*)

Pada tahap ini perselisihan sudah mulai menegang. Pihak yang bertikai mulai melihat mereka memiliki pandangan yang berbeda, dan masing-masing pihak bergerak ke wilayah “siapa yang benar, siapa yang salah”. Pihak yang bertikai mengambil tindakan berdasarkan asumsi dan persepsi masing-masing.

Pada tahap ini, pihak yang bertikai mulai mencampurkan inti permasalahan dengan nilai atau kepercayaan yang mereka anut. Permasalahan sudah tidak dapat didefinisikan dengan jelas dan objektif. Masing-masing pihak sudah tidak mempercayai pihak lainnya.

Pada tahap ini, EWS masih belum terlambat untuk mendeteksi dan memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan untuk segera melakukan tindakan sistematis untuk menurunkan ketegangan antara pihak yang bertikai.

(3) Kontes (*Contest*)

Pada tahap ini, pihak yang bertikai sudah masuk ke wilayah “Siapa yang benar, siapa yang salah”, dan menjadi penting bahwa pihak mereka lah yang benar. Masing-masing pihak merasa pihak lawan harus menerima solusi dari mereka, karena mereka lah yang benar, sedangkan pihak lain itu salah.

Di tahap ini pihak yang bertikai sudah menyerang pribadi pihak lawan, membentuk faksi/kubu, memberikan label negatif kepada kubu lawan, sehingga permasalahan utama yang menjadi penyebab perselisihan terdistorsi oleh sikap masing-masing pihak.

Pada tahap ini, EWS dinilai sudah terlambat untuk memberikan *warning* awal kepada para pemangku kepentingan. Di tahap ini sudah masuk pada level *Prevention* / Pencegahan agar konflik tidak semakin memburuk.

(4) Melawan / Pergi (*Fight / Flight*)

Di tahap ini kemenangan tidak lagi yang utama, tapi menyingkirkan faksi atau pihak lawan seutuhnya. Pembicaraan pada level ini telah pembicaraan telah masuk tahap “Prinsip” bukan lagi inti permasalahan.

Pihak yang bertikai tidak lagi puas dengan solusi. Mereka harus menyingkirkan atau mengusir pihak lawan dengan menyakiti secara emosional maupun fisik. Masing-masing pihak berupaya menimbulkan rasa sakit pada pihak lain sampai pada titik pihak tersebut menyerah dan kemudian pergi atau mengungsi. Di tahap ini, kompromi dengan pihak lawan adalah sebuah kerugian.

Pada tahap ini, Sistem Peringatan Dini sudah sangat terlambat. Pendekatan yang dilakukan sudah harus menggunakan mediator / negosiator, pihak ketiga yang netral, aparat keamanan sudah pada level Siaga Tinggi agar konflik fisik tidak memakan korban jiwa.

(5) Situasi yang Sulit Diatasi (*Intractable Situation*)

Pada situasi ini, para pihak tidak lagi puas dengan membuat pihak lawan pergi, mereka ingin menyingkirkan mereka sepenuhnya. Sudah tidak ada lagi pemahaman tentang permasalahan awal yang membuat konflik ini pecah, yang ada hanya pemahaman bagaimana pihak lain hancur sepenuhnya. Konflik pada level ini sudah tidak dapat dikendalikan, karena energi para pihak sepenuhnya difokuskan untuk menghancurkan pihak lawan, ada titik ekstrim, menghapus mereka dari muka bumi. Pihak-pihak yang terlibat berada pada kondisi yang berbahaya.

Para pihak pada tahap ini sudah pada level fanatik. Mereka tidak akan berhenti berjuang menghancurkan lawan karena mereka merasa tidak bermoral jika harus berhenti. Masing-masing pihak merasa bahwa mereka sedang menjalankan “Perintah Tuhan” untuk menghancurkan kejahatan (pihak lawan).

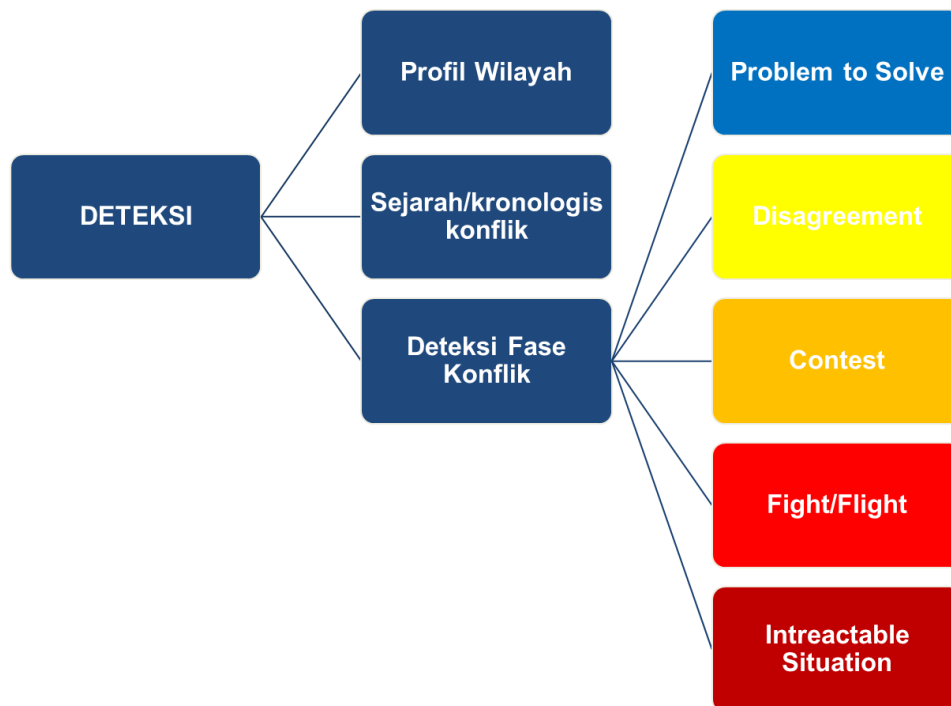
Pada level tertinggi konflik ini, EWS sama sekali tidak berguna. Di tahap ini, pihak keamanan sudah mengambil alih sepenuhnya. Pihak yang bertikai harus dipisahkan sepenuhnya.

Dalam manajemen krisis, sangat dibutuhkan kemampuan dan pemahaman yang dapat mendeteksi potensi konflik lebih sedini mungkin. Deteksi dini merupakan kegiatan pendugaan untuk sesuatu keadaan di masa mendatang (*forecasting*), dengan mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dilakukan (Eriyatno,1989).

Deteksi dini dapat dipisahkan dalam dua jangka waktu perkiraan, yaitu perkiraan jangka panjang dan perkiraan jangka pendek. Perkiraan jangka panjang tujuannya lebih ditekankan pada penyusunan strategi pencegahan.

X. 8. 2. Metode Deteksi Dini Potensi Konflik

Sebelum mengisi instrumen pelaporan Religiosity Index, diharapkan para pelapor memiliki pemahaman yang kuat akan Deteksi Dini gejala konflik di daerah mereka. Untuk itu para pelapor perlu mengetahui pemahaman akan profil wilayah/kabupaten yang menjadi obyek konflik seperti: sejarah, geografis, demografis, kondisi sosial agama, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya. Kedua mengetahui sejarah atau latar belakang serta kronologis konflik yang pernah terjadi di suatu kabupaten atau wilayah tertentu.



Untuk lebih memudahkan menyusun sejarah dan latar belakang konflik, daftar di bawah ini dapat digunakan sebagai pedoman:

KAPAN (when)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapan konflik terjadi? • Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
DIMANA (Where)	<ul style="list-style-type: none"> • Di mana konflik kekerasan terjadi?
SIAPA (Who)	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa orang/kelompok yang terlibat konflik? • Apa peran masing-masing kelompok tersebut? • Siapa tokoh utama dari masing-masing kelompok? • Siapa pemangku kepentingan dan apa perannya?
APA (What)	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang disengketakan/dikonflikkan? • Apa isu konfliknya ?
BAGAIMANA (How)	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses terjadinya konflik?
Mengapa (Why)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengapa konflik terjadi?

Ketiga, mendeteksi fase konflik yang meliputi analisis terhadap tingkat eskalasi dari Problem to Solve sampai ke fase Intractable Situation. Para pengajar dan pengisi laporan diwajibkan paham ciri-ciri dari setiap fase tersebut.

X. 8. 3. Analisis Faktor Konflik

Terdapat dua model analisis yang dapat digunakan untuk memetakan konflik yang terjadi, yaitu analisis faktor dan analisis aktor. Untuk analisis aktor akan dijelaskan lebih rinci dalam bab Stakeholder Network & Map Analysis.

Berikut di bawah ini penjelasan terkait analisis Faktor Konflik.

1. Analisis Faktor Struktural

Faktor Struktural (*Structural Factors*) adalah faktor-faktor struktural atau ‘latar belakang’ yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial dan agama. Faktor-faktor ini bisa meliputi marginalisasi politik, sosial, dan ekonomi secara sistematis, kesenjangan ekonomi yang besar, ketiadaan institusi yang memadai dan responsif, pergeseran dalam hal keseimbangan demografis, kemerosotan ekonomi, dan kerusakan ekologis terhadap suatu wilayah. Secara garis besar, faktor struktural ini dapat menjadi profil wilayah yang dapat digunakan untuk penilaian awal potensi / kemungkinan (*Likelihood*) dan tingkat kerentanan suatu wilayah.

Komponen indikator struktural digunakan untuk menilai risiko konflik laten. Penilaian risiko melihat potensi konflik dalam jangka panjang melalui analisis faktor struktural yang bisa saja terentang selama beberapa dekade sebelumnya. Karakter dari indikator struktural adalah indikator yang bersifat umum, mendasar, menggambarkan struktural, serta latar belakang pra-kondisi yang memungkinkan terjadinya konflik.

Hal penting lain adalah, Faktor Struktural harus disusun dengan indikator yang bisa diukur naik-turunnya, misal menggunakan kata tingkat, proporsi dan presentase. Indikator juga bisa disusun dengan cara membuat skala yang berlaku secara spesifik di daerah tertentu. Indikator juga bermaksud untuk mengetahui tingkat risiko konflik akibat naik-turunnya nilai indikator tertentu. Dengan demikian disimpulkan bahwa Faktor Struktural bersifat jangka panjang.

Geografi	
Demografi	

Sejarah	
Agama	
Sosial dan Ekonomi	
Politik & Hukum	
Budaya	

Percepatan (Accelerator) merupakan kejadian-kejadian di luar parameter-parameter model di atas. Secara esensial akselerator merupakan kejadian-kejadian umpan-balik yang dengan cepat meningkatkan level signifikansi situasi umum yang paling mengandung kekerasan. Tetapi bisa juga Akselerator yang mempengaruhi kegagalan sistem atau perubahan-perubahan mendasar dalam kausalitas politik dan sosial. Seringkali Akselerator juga dipahami sebagai katalisator dalam proses eskalasi konflik. Definsi akselerator Kejadian-kejadian yang tidak berhubungan langsung dengan indikator-indikator penyebab konflik, akan tetapi bisa meningkatkan secara cepat proses eskalasi atau de-eskalasi konflik.

Contoh dari akselerator adalah sebagai berikut: (1) Kebijakan pemerintah yang diskriminatif; (2) Konflik bersenjata/kekerasan antarkelompok; (3) Peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok yang bertikai; (4) Peningkatan hubungan kelompok *vis a vis* kelompok lainnya; (5) Peningkatan teknik-teknik kekerasan sebagai instrumen konflik; (6) Peningkatan bentuk-bentuk agresivitas; (7) meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap “integritas hidup manusia” (Life Integrity Violations).

Kebijakan Diskriminatif	
Konflik Kekerasan	
Disintegrasi Kelompok	
Pelanggaran Hukum	
Pelanggaran HAM	
lain-lain	

Pemicu (Trigger) adalah kejadian tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik. Contoh dari Pemicu adalah pembunuhan / penyerangan tokoh penting atau pemimpin kelompok tertentu, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik, perusakan simbol-simbol identitas dan lain sebagainya. Pemicu bersifat jangka pendek namun sporadis.

Kriminalitas	
Insiden Kekerasan Antar Kelompok	
Insiden Kekerasan lainnya	
Peristiwa lainnya	

BAHAN DISKUSI

No.	KASUS	LINK BERITA
1	Persekusi Biksu di Tangerang	https://asumsi.co/post/55328/persekusi-biksu-di-tangerang-larangan-rumah-pribadi-dijadikan-rumah-ibadah/
2	Rampas Hak Kepemilikan Tanah Warga Sunda Wiwitan	https://independensi.com/2022/06/09/diskriminasi-agama-dalam-peradilan-rampas-hak-kepemilikan-tanah-warga-sunda-wiwitan/
3	Konflik Poso	https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/100000279/konflik-poso-latar-belakang-kronologi-dan-penyelesaian?page=all
4	Konflik Tanjung Balai	https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai
5	Konflik Kei	https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-warga-tewas-akibat-bentrok-di-maluku-tenggara-bupati-bukan-konflik-agama.html
6	Konflik Syiah Sampang	https://nasional.tempo.co/read/425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang
7	Kericuhan di HKBP Garu	https://medan.tribunnews.com/2019/07/24/kerusuhan-di-hkbp-garu-viii-medan-jemaat-nyaris-adu-jotos-saat-ibadah-minggu-videonya-viral?page=all
8	Ahmadiyah Sintang	https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58455599
9	Konflik HKBP Cibinong	https://metro.tempo.co/read/1376545/konflik-internal-jemaat-gereja-hkbp-cibinong-bogor-ricuh
10	Wahabi vs NU (Aceh & NTB)	https://www.acehstandar.com/news/pbnu-wahabi-salafi-gampang-sebut-kelompok-lain-sesat-dan-kafir/index.html
11	Jemaat GPI Tulang Bawang Dilarang Ibadah Natal	https://lampung.suara.com/read/2021/12/29/132326/jemaat-gpi-tulang-bawang-dilarang-ibadah-natal-ini-kata-lbh-bandar-lampung
12	Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten	https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all
13	Penolakan Renovasi Masjid	https://tirto.id/di-balik-polemik-penolakan-menara-masjid-di-papua-cGrd

	Sentani	
14	Warga Larang Ibadah Natal di Lampung, Salib Gereja Sepakat Diturunkan	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228090918-20-739431/warga-larang-ibadah-natal-di-lampung-salib-gereja-sepakat-diturunkan
15	Penolakan Pura di Bekasi	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48215796
16	Penolakan Pembangunan Gereja Santo Joseph	https://regional.kompas.com/read/2020/02/16/15010091/fakta-penolakan-pembangunan-gereja-santo-joseph-di-karimun-jokowi--tindak?page=all .
17	Penolakan Vihara Deli Serdang	https://independensi.com/2022/10/14/penolakan-pembangunan-vihara-di-deli-serdang-intoleransi-tak-disanksi/
18	Penolakan Renovasi Vihara di Sukabumi	https://www.arahkita.com/news/read/35645/vox-point-indonesia-kecam-penolakan-renovasi-vihara-di-sukabumi--desak-aparat-bertindak
19	Larangan Pembangunan Masjid Muhammadiyah di Aceh	https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/06/09/o8he68361-ini-kronologi-larangan-pembangunan-masjid-muhammadiyah-di-aceh .
20	2 Pria di Bogor Rusak Gereja konflik dalam kepengurusan gereja	https://news.detik.com/berita/d-6355889/duduk-perkara-2-pria-di-bogor-rusak-gereja
21	GPKAI tolak Pengajaran Sion Kids	http://arfaknews.com/read/3492/Papua-Barat/contact-us
22	Konflik Kepemimpinan Antar Pejabat Gerejawi Di GKA Elyon Rungkut Surabaya	https://katalog.ukdw.ac.id/3711/
23	Konflik GBI Nginden, Anak Ayah	https://www.jawaban.com/read/article/id/2014/10/07/90/141007144219/Konflik-GBI-Nginden,-Anak-Ayah-Saling-Gugat

	Saling Gugat	
24	Penolakan Hare Khrisna dan Mahasaba	https://baliportalnews.com/2021/10/tolak-hare-khrisna-dan-mahasaba-xii-aliansi-hindu-nusantara-gelar-aksi-damai-didepan-kantor-gubernur-bali/
25	Pelecehan seksual terhadap santriwati di Jombang.	https://www.ngopibareng.id/read/bap-kasus-anak-kiai-cabul-di-jombang-dikembalikan-ke-penyidik
26	Rendang Babi	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611070547-20-807661/heboh-rendang-babi-pemilik-dipanggil-polisi-hingga-minta-maaf
27	Pendeta Perkosa 14 Orang dan Rekam Aksi Sendiri	https://news.detik.com/berita/d-6296462/keji-kelakuan-pendeta-perkosa-14-orang-dan-rekam-aksi-sendiri .
28	Biksu Dituduh Perkosa 5 Anak di Jakarta	https://www.suara.com/news/2017/08/30/110251/biksu-lari-karena-dituduh-perkosa-5-anak-di-jakarta
29	Ustad di Bandung Perkosa 13 Santriwati	https://kabartrenggalek.com/2021/12/ustad-di-bandung-perkosa-13-santriwati-8-di-antaranya-sampai-melahirkan.html
30	Wanita diduga NII	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63382890
31	Wanita terobos Istana	https://nasional.tempo.co/read/1650362/densus-88-tetapkan-guru-siti-elina-jadi-tersangka-kasus-terorisme
32	Penembakan Mabes Polri	https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674
33	Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo	https://nasional.tempo.co/read/1638894/ledakan-di-asrama-brimob-sukoharjo-bukan-pertama-kali-di-kabupaten-sukoharjo
34	MIT Poso	https://regional.kompas.com/read/2021/05/11/184057778/korban-serangan-mit-ke-desa-di-poso-bertambah-jadi-4-orang
35	Saksi Jehova	https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/27/10/2017/aliran-saksi-yehuwa-larang-hormat-bendera-begini-ajarannya/
36	Pembubaran FPI	https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13205551/isi-lengkap-skb-tentang-pembubaran-dan-pelarangan-kegiatan-fpi
37	KKB Serang Pos TNI	https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/115642178/kkb-serang-pos-tni-gome-kapolda-papua-saya-mengutuk-tindakan

	Gome	mereka?page=all
38	Gerakan Aceh Merdeka	https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian?page=all
39	FKM RMS	https://regional.kompas.com/read/2020/04/25/22130071/fakta-aktivis-fkm-rms-terobos-polda-maluku-hingga-pengibaran-bendera-benang?page=all
40	Sunda Empire	https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4862753/sunda-empire-sistem-pemerintahan-di-dunia-dikendalikan-dari-bandung
41	Gerakan Minahasa Merdeka	https://www.pinterpolitik.com/in-depth/minahasa-merdeka-ujian-bagi-nkri//
42	Pembubaran HTI	https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah
43	NII Suami Elina	https://www.msn.com/id-id/news/other/terlibat-jaringan-negara-islam-indonesia-suami-siti-elina-ditetapkan-jadi-tersangka/ar-AA13q4VF
44	PA 212 Reuni 411 Turunkan Jokowi	https://kumparan.com/kumparannews/pa-212-akan-gelar-aksi-411-di-istana-negara-turunkan-jokowi-1z2LD5YGclr
45	FPI ancam gulingkan SBY	https://nasional.tempo.co/read/312508/berani-bubarkan-ormas-fpi-ancam-gulingkan-pemerintah-sby
46	Khilafatul Muslimin	https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/17/08061601/doktrin-di-sekolah-khilafatul-muslimin-murid-dilarang-hormat-bendera?page=all
47	Pilkada DKI	https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/102079/politik-identitas-pilkada-dki-menular
48	UU Otonomi Khusus Papua	https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001
49	UU Pemerintahan Aceh	https://nasional.tempo.co/read/1646972/tim-gabungan-tangkap-11-perempuan-diduga-langgar-syariat-islam-ini-4-lembaga-penegak-hukum-syariat-di-aceh
50	UU No. 13 Tahun 2012 (Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)	https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/273#:~:text=%2D%20Undang%20Undang%20Nomor%203%20Tahun,Undang%20Undang%20Nomor%203%20jo.
51	Investasi Miras (Bali, NTT, Sulut,	https://news.detik.com/berita/d-5474164/jokowi-bolehkan-investasi-miras-di-bali-ntt-sulut-papua

	Papua)	
52	Konflik Lampung Selatan (Bali & Lampung)	https://www.viva.co.id/ragam/fokus/363482-lampung-selatan-berdarah-siapa-salah
53	Konflik Sambas Kalimantan Barat	https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/06/150000479/kerusuhan-sambas-1999-penyebab-kronologi-dan-dampak?page=all
54	Konflik Sampit	https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/konflik-sampit-latar-belakang-konflik-dan-penyelesaian?page=all
55	Diskriminasi atas Hak kepemilikan Tanah di Jogjakarta	https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161005_majalah_tanah_yogyakarta
56	Rasisme Papua di Surabaya	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819072043-20-422556/kronologi-pengepungan-asrama-papua-surabaya-versi-mahasiswa

DAFTAR PUSTAKA

- (ITP), I. T. (2012). *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*. Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS.
- Ana Ruiz-Varona, J. L.-C. (2017). Social risk map. The design of a complementary methodology to vulnerability indexes applied to urban regeneration activity. *24th ISUF International Conference*, 157.
- Barsihannor. (2016). *Pengantar Pembelajaran Perdamaian dan Resolusi Konflik*. Makassar: Nur Khairunnisa.
- Centre of Competence on Humanitarian Negotiation (CCHN). (2019). *CCHN Field Manual on Frontline Humanitarian Negotiation*. Geneva: Centre of Competence on Humanitarian Negotiation (CCHN).
- Christina Prell, K. H. (2009). Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. *Society and Natural Resources*, 501.
- Conflict Resolution Unit (CRU). (2017). *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*. Bogor: Conflict Resolution Unit (CRU).
- Dendy Kurniawan, A. i. (2020). Pemanfaatan Social Network Analysis untuk Menganalisis Kolaborasi Karyawan pada PT. Arum Mandiri Group. *Transformatika*, 149-159.
- Koschade, S. (2006). A Social Network Analysis of Jemaah Islamiyah: The Applications to Counterterrorism and Intelligence. *Studies in Conflict and Terrorism*, 559-575.
- Leas, S. (2002). *Moving Your Church through Conflict*. Herndon, VA: Alban Institute.
- Morgan Burcher, C. W. (2017). Social network analysis as a tool for criminal intelligence: understanding its potential from the perspectives of intelligence analysts. *School of Humanities and Social Sciences, Deakin University*.
- Muhlis Hafel, J. J. (2021). Pemetaan Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal dengan Menggunakan Metode Social Network Analysis. *Al Qisthi : Jurnal Sosial dan Politik*, 39.
- Ressler, S. (2006). *Social Network Analysis as an Approach to Combat Terrorism: Past, Present, and Future Research*. Pennsylvania: Homeland Security Affairs.
- Steven T. Zech, M. G. (2016). Social Network Analysis in the Study of Terrorism and Insurgency: From Organization to Politics. *International Studies Review*, 214-243.
- Sulistya Ekawati, S. A. (2020). *Sosial, ekonomi, Kebijakan & Pemberdayaan Masyarakat serta Resolusi Konflik*. Bogor: IPB Press.